



LAPORAN KINERJA

TAHUN
2024

DIREKTORAT PERLINDUNGAN
HORTIKULTURA



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: <https://itjen.pertanian.go.id/> e-mail: itjen@pertanian.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA, KEMENTERIAN PERTANIAN TA. 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Eselon I dan II lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Hortikultura.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 31 Januari 2025

Inspektur I,



Andry Asmara, S.E., M.M.
NIP. 197312141994031001

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Perlindungan Hortikultura merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Perlindungan Hortikultura atas pelaksanaan program pengembangan sistem perlindungan hortikultura dan penggunaan anggaran negara. Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Implementasi Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2020-2024.

Penyusunan LAKIN Direktorat Perlindungan Hortikultura mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura, semoga dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura di masa yang akan datang.

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur,



Muhammad Sidig, STP, MM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perlindungan hortikultura memiliki peran penting dalam agribisnis hortikultura untuk menghasilkan produk hortikultura berkualitas, aman dikonsumsi dan berdaya saing. Kegiatan perlindungan hortikultura dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pengamanan produk hortikultura mendukung pengembangan komoditas yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan tanaman tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang didalamnya mencakup pengendalian pertanian sesuai prinsip Pengelolaan Hama Terpadu (PHT). Kebijakan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura yang mengamanatkan bahwa pengendalian OPT dilakukan secara ramah lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, pengendalian OPT menjadi tanggungjawab petani, sedangkan peranan pemerintah berwenang membantu dalam kasus eksplosif.

Kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura adalah pelaksanaan sistem perlindungan hortikultura yang efektif dan efisien. Keberhasilan perlindungan hortikultura dicerminkan dengan menurunnya kerusakan dan kehilangan hasil produksi akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Sejalan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Perlindungan Hortikultura telah menetapkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Selanjutnya IKU menjadi dasar dalam perumusan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Capaian RKT Tahun 2024 diukur melalui indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yaitu: 1) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura; 2) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI; dan 3) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Mendukung sasaran yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tersebut, Direktorat Perlindungan Hortikultura pada Tahun 2024 mengimplementasikannya melalui pelaksanaan kegiatan dengan target output utama, yaitu: 1) Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan; 2) Area Pengendalian OPT Hortikultura; 3) Area Penanganan DPI Hortikultura; dan 4) Sarana Perlindungan Hortikultura. Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024, Direktorat Perlindungan Hortikultura memperoleh alokasi pagu anggaran senilai Rp25.000.000.000. Namun karena adanya blokir penghematan anggaran perjalanan dinas senilai Rp1.500.000.000, maka anggaran yang dapat dimanfaatkan pada tahun 2024 adalah senilai Rp23.500.000.000.

Realisasi keuangan Direktorat Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 adalah senilai Rp23.487.624.045 (93,95%) dari pagu anggaran senilai Rp25.000.000.000. Sedangkan bila dibandingkan dengan anggaran setelah penghematan perjalanan dinas, maka realisasi keuangan menjadi sebesar 99,96%.

Realisasi pelaksanaan kegiatan utama dari indikator kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura tahun 2024 antara lain:

- 1) Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan dilaksanakan sebanyak 24 kegiatan, sehingga capaian realisasi fisik sebesar 100% dari target 24 kegiatan. Realisasi keuangan senilai Rp5.201.540.580.446, yaitu sebesar 86,69% dari pagu anggaran (Rp6.000.000.000). Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp796.344.000, maka realisasi keuangan menjadi sebesar 99,96%;
- 2) Area Pengendalian OPT Hortikultura dilaksanakan pada area hortikultura seluas 2.500 ha, sehingga capaian realisasi fisik sebesar 100% dari target area pengendalian OPT seluas 2.500 ha. Realisasi keuangan senilai Rp9.375.790.119, yaitu sebesar 93,76% dari pagu anggaran (Rp10.000.000.000). Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp620.359.000, maka realisasi keuangan menjadi sebesar 99,95%;
- 3) Area Penanganan DPI Hortikultura dilaksanakan pada area hortikultura terkena DPI seluas 200 ha, sehingga capaian realisasi fisik sebesar 100% dari target area penanganan DPI seluas 200 ha. Realisasi keuangan senilai Rp4.950.544.355, yaitu sebesar 99,01% dari pagu anggaran (Rp5.000.000.000). Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp49.297.000, maka realisasi keuangan menjadi sebesar 100%; dan
- 4) Sarana Perlindungan Hortikultura dilaksanakan pada 50 unit, sehingga capaian realisasi fisik sebesar 100% dari target 50 unit. Realisasi keuangan senilai Rp3.960.949.125, yaitu sebesar 99,02% dari pagu anggaran (Rp4.000.000.000). Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp34.000.000, maka realisasi keuangan menjadi sebesar 99,87%.

Realisasi indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura pada tahun 2024 adalah sebesar 99,69% dari target minimal sebesar 99,65%. Diperoleh nilai capaian sebesar 100,04%, dan masuk pada kategori capaian kinerja 'sangat berhasil';

- 2) Realisasi rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI pada tahun 2024 adalah sebesar 93,30% dari target minimal 93,05%. Diperoleh nilai capaian sebesar 100,27%, dan masuk pada kategori capaian kinerja 'sangat berhasil'; dan
- 3) Realisasi dari tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura adalah 3,23 skala likert dari target minimal 3,21 skala likert. Diperoleh capaian sebesar 100,62%, dan masuk pada kategori capaian kinerja 'sangat puas'.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	2
1.3. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).....	3
1.4. Dukungan Anggaran Tahun 2024.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.....	6
2.1.1. Visi dan Misi.....	6
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	7
2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi.....	8
2.1.4. Kerangka Regulasi.....	10
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	10
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	11
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan.....	14
3.2. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	14
3.2.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	18
3.2.2. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2020-2024.....	25
3.3. Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	26
3.4. Realisasi Keuangan.....	61

3.4.1. Capaian Realisasi Keuangan Per Kegiatan.....	61
3.4.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya	65
3.5. Permasalahan dan Tindak Lanjut	67
BAB IV. PENUTUP	70
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024	8
Tabel 2.	Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024	10
Tabel 3.	Rincian Output yang Mendukung Kegiatan Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024.....	11
Tabel 4.	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024.....	11
Tabel 5.	Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024.....	12
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024	16
Tabel 7.	Rasio Serangan OPT yang dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura Tahun 2024.....	18
Tabel 8.	Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI Tahun 2020-2024	23
Tabel 9.	Perbandingan Target Kinerja Tahun 2020-2024	25
Tabel 10.	Realisasi Fisik Kinerja Utama Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 (<i>data update 21 Januari 2025</i>)	26
Tabel 11.	Realisasi Keuangan Kinerja Utama Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 (<i>data update 21 Januari 2025</i>).....	27
Tabel 12.	Capaian Realisasi Target Kegiatan Area Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2020-2024.....	32
Tabel 13.	Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Area Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024.....	33
Tabel 14.	Rincian Target dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Area Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024	34
Tabel 15.	Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Fasilitas Bahan Pengendali OPT untuk Cadangan LPHP Tahun 2024	40
Tabel 16.	Rincian Target dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Bahan Pengendali OPT sebagai Cadangan LPHP Tahun 2024.....	41
Tabel 17.	Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan DPI Tahun 2024	48

Tabel 18.	Rincian Target dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi DPI Tahun 2024	48
Tabel 19.	Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT Tahun 2024	50
Tabel 20.	Rincian Target dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT Tahun 2024.....	50
Tabel 21.	Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Klinik PHT Tahun 2024	53
Tabel 22.	Rincian dan Target dan Realisasi Fisik Fasilitasi Pengembangan Klinik PHT Tahun 2024	53
Tabel 23.	Fasilitasi Akreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk LPHP Tahun 2024	56
Tabel 24.	Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Fasilitasi Pengendali OPT Ramah Lingkungan pada Kampung Perlindungan Hortikultura TA 2024	60
Tabel 25.	Realisasi Keuangan dan Fisik berdasarkan Output dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) per 21 Januari 2025	62
Tabel 26.	Realisasi Keuangan dan Fisik berdasarkan Output dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan Mempertimbangkan Blokir Penghematan Perjalanan Dinas Tahun 2024	63
Tabel 27.	Pencapaian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura 2024	64
Tabel 28.	Nilai Efisiensi pada Rincian Output Kegiatan Perlindungan Hortikultura Tahun 2024	66
Tabel 29.	Nilai Efisiensi pada Rincian Output Kegiatan Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 (Mempertimbangkan Blokir Penghematan Perjalanan Dinas).....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur pelaporan data OPT hortikultura	22
Gambar 2.	Luas area penanganan DPI (banjir dan kekeringan) terkena maupun puso pada komoditas hortikultura tahun 2020-2024.....	23
Gambar 3.	Alur pelaporan data DPI	25
Gambar 4.	Grafik capaian pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan pada tahun 2020-2024.	31
Gambar 5.	Grafik capaian pelaksanaan kegiatan Area Pengendalian OPT Hortikultura pada tahun 2020-2024.	33
Gambar 6.	Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024.....	35
Gambar 7.	Distribusi Fasilitas Pengendali OPT pada Lokasi Terdampak Banjir di Kabupaten Aceh Selatan.	36
Gambar 8.	Serah terima Fasilitas Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan	37
Gambar 9.	Fasilitas pengendali OPT cabai tahun 2024	38
Gambar 10.	Kegiatan pemanfaatan fasilitas pengendali OPT lalat buah ramah lingkungan pada komoditas salak di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.....	38
Gambar 11.	Fasilitas pengendali OPT ramah lingkungan tahun 2024 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Bali.....	39
Gambar 12.	Serah terima bahan pengendali OPT, proses pemanfaatan fasilitas dan produk jadi dari fasilitas bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP tahun 2024.	44
Gambar 13.	Kegiatan AWM lalat buah di Kabupaten Magelang, Banjarnegara dan Sleman.....	45
Gambar 14.	Kegiatan koordinasi non host status lalat buah tahun 2024.	46
Gambar 15.	Capaian kegiatan Area Penanganan DPI Hortikultura pada tahun 2020- 2024.....	47
Gambar 16.	Kegiatan fasilitas DPI pada tahun 2024.....	49
Gambar 17.	Fasilitas mitigasi DPI dan pengendali OPT tahun 2024	51
Gambar 18.	Serah terima fasilitas pengembangan klinik PHT tahun 2024	55
Gambar 19.	Dokumen Sertifikasi Akreditasi ISO17025 untuk LPHP Wilayah Kedu	56

Gambar 20. Pendampingan Persiapan Akreditasi LPHP Wilayah Kedu.....	56
Gambar 21. Pendampingan akreditasi 17025 Satpel wilayah I (LPHP) Cianjur.....	58
Gambar 22. Pemasyarakatan perlindungan hortikultura tahun 2024	59
Gambar 23. Gapura kampung perlindungan hortikultura tahun 2024	60
Gambar 24. Fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan di kampung perlindungan hortikultura dari atas ke bawah (Kabupaten Sleman, Banjarnegara, Brebes, Garutd Solok).....	61
Gambar 25. Komposisi Anggaran Direktorat Perlindungan Hortikultura per KRO Tahun 2024.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Hortikultura	71
Lampiran 2.	Data Pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024.....	72
Lampiran 3.	Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura 2024	73
Lampiran 4.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sd Tim Kerja 2024	77
Lampiran 5.	Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6.	Realisasi Anggaran per Triwulan 2024	80
Lampiran 7.	Rasio Serangan OPT Hortikultura Tahun 2020-2024	81
Lampiran 8.	Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI Tahun 2020- 2024	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 9.	Rencana aksi Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024	85
Lampiran 10.	Matrik Upaya Pencapaian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024.....	87
Lampiran 11.	Data Pendukung Lain yang Relevan.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura sebagai suatu organisasi kepada para pemangku kepentingan, perlu disusun Laporan Kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi yang mengelola keuangan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Perlindungan Hortikultura ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Hortikultura periode 2020-2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun arah kebijakan perlindungan hortikultura, yaitu: 1) Perlindungan tanaman hortikultura berbasis sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT); 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan hortikultura; 3) Peningkatan dan pengembangan kelembagaan perlindungan (Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Laboratorium Pengendalian Hama dan Penyakit (LPHP), Laboratorium Agens Hayati (LAH), Laboratorium Pestisida, dan Klinik PHT); 4) Peningkatan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hortikultura; serta 5) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Landasan hukum dan dasar pertimbangan pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 887/Kpts/OT/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT. Disamping itu, dalam era otonomi daerah, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Landasan hukum dan ketentuan-ketentuan peraturan tersebut diwujudkan dalam kebijakan penerapan sistem PHT dalam rangka pengelolaan budidaya tanaman sehat. Hal ini sesuai Permentan No. 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik *Good Agricultural Practices* (GAP) dan sesuai dengan persyaratan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) - *World Trade Organization* (WTO) dalam perdagangan global.

Tahun 2024 adalah tahun ke-5 pelaksanaan Implementasi Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2020-2024. Dukungan Direktorat Perlindungan Hortikultura pada Tahun 2024 berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) meliputi:

1. Koordinasi (AEA) yang terdiri atas Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan Perlindungan Hortikultura; dan
2. Sarana Pengembangan Kawasan (RAI) yang terdiri atas kegiatan: a) Area Pengendalian OPT Hortikultura; b) Area Penanganan DPI Hortikultura; dan c) Sarana Perlindungan Hortikultura.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sesuai dengan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hortikultura. Sedangkan fungsi Direktorat Perlindungan Hortikultura sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengendalian OPT buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan DPI;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian OPT buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan DPI;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian OPT buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan DPI;
- 4) Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan hortikultura;
- 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian OPT buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan DPI;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian OPT buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan penanganan DPI, peningkatan dan

penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi perlindungan hortikultura;

7) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Permentan nomor 19 Tahun 2022 tersebut, Direktorat Perlindungan Hortikultura, terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Direktorat Perlindungan Hortikultura terlampir dalam Lampiran 1.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Uraian tugas kelompok substansi pada kelompok Jabatan Fungsional lingkup Direktorat Perlindungan Hortikultura berdasarkan Kepmentan nomor 278 tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) **Kelompok Data dan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura** mempunyai tugas melakukan pengelolaan data perlindungan hortikultura dan penyiapan dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- 2) **Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura** mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura.
- 3) **Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sayuran dan tanaman obat.
- 4) **Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan dampak perubahan iklim.

1.3. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Hortikultura dibutuhkan kemampuan SDM yang handal, serta dukungan



dana, sarana dan prasarana yang memadai. Pelaksanaan tertib administrasi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga peningkatan kemampuan SDM khususnya pelaksana ketatausahaan, harus dilakukan secara periodik. Demikian juga dengan kemampuan teknis bagi para tenaga teknis/fungsional, perlu ditingkatkan secara terus menerus melalui pelatihan, apresiasi, *workshop*, bimbingan teknis, dalam mengikuti perkembangan teknologi di bidang perlindungan hortikultura.

Komposisi seluruh pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 sebanyak 43 orang ASN yang terdiri dari 37 orang PNS, dan 6 orang PPPK. Rincian pegawai terlampir dalam Lampiran 2.

1.4. Dukungan Anggaran Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) 2024 anggaran yang dikelola oleh Direktorat Perlindungan Hortikultura senilai Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) yang mengacu dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang terbit Nomor: SP DIPA-018.04.1.625875/2024 Tanggal 5 Januari 2024. Namun seiring berjalannya waktu, terjadi blokir penghematan perjalanan dinas sebesar 50% senilai Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan pada tahun 2024 senilai Rp23.500.000.000 (Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun rincian blokir penghematan perjalanan dinas tahun 2024 sebagai berikut:

- Pagu anggaran indikator kinerja Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan adalah senilai Rp6.000.000.000, anggaran yang diblokir untuk penghematan perjalanan dinas pada tahun 2024 adalah senilai Rp796.344.000, sehingga sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah senilai Rp5.203.656.000;
- Pagu anggaran indikator kinerja Area Pengendalian OPT Hortikultura adalah senilai Rp10.000.000.000, anggaran yang diblokir untuk penghematan perjalanan dinas pada tahun 2024 adalah senilai Rp620.359.000, sehingga sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah senilai Rp9.379.641.000;
- Pagu anggaran indikator kinerja Area Penanganan DPI Hortikultura adalah senilai Rp5.000.000.000, anggaran yang diblokir untuk penghematan perjalanan dinas pada tahun 2024 adalah senilai Rp49.297.000, sehingga sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah senilai Rp4.950.703.000;
- Pagu anggaran indikator kinerja Sarana Perlindungan Hortikultura adalah senilai Rp4.000.000.000, anggaran yang diblokir untuk penghematan perjalanan dinas

pada tahun 2024 adalah senilai Rp34.000.000, sehingga sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah senilai Rp3.966.000.000.

Direktorat Perlindungan Hortikultura merupakan direktorat teknis yang memiliki peran penting dalam peningkatan produksi hortikultura. Namun proporsi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT dan DPI hanya pada 7 (tujuh) provinsi sesuai anggaran yang dialokasikan. Sedangkan provinsi lainnya diperoleh dalam bentuk data dan informasi OPT dan DPI per 2 minggu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu alat manajemen dalam rangka penyelenggaraan pemerintah terdesentralisasi, yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintah yang terukur dan transparan kepada publik terhadap kegiatan yang difasilitasi pemerintah. Melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menerapkan SAKIP dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP tersusun atas beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut antara lain Perencanaan Kinerja. Komponen perencanaan kinerja meliputi: a) Rencana Strategis (Renstra), b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), c) Indikator Kinerja Utama (IKU), dan d) Penetapan Kinerja (PK) atau Perjanjian Kinerja. Berikut dipaparkan komponen terkait Perencanaan Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura:

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

Sistem Perlindungan tanaman, baik *on farm* maupun *off farm* sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan pengembangan hortikultura, terutama dalam mempertahankan produksi, produktivitas dan peningkatan mutu produksi. Upaya yang dilakukan melalui penekanan kehilangan hasil akibat serangan OPT dan DPI (banjir dan kekeringan) berupa peningkatan mutu produksi hasil sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan aman dikonsumsi; menciptakan sistem produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; serta mendukung pemenuhan persyaratan teknis *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dalam perdagangan global.

Direktorat Perlindungan Hortikultura merupakan salah satu direktorat teknis di lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yang menangani perlindungan tanaman hortikultura. Dalam mendukung terwujudnya hortikultura yang tangguh, Rencana Strategis Perlindungan Hortikultura disusun sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan Hortikultura 2020-2024. Berbagai kegiatan utama yang bermanfaat dan berdampak positif untuk pengembangan hortikultura ramah lingkungan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2.1.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Renstra Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2020-2024, telah ditetapkan visi dan misi yang akan dicapai sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Kemandirian Petani dalam Pengendalian OPT Berdasarkan Perapan PHT”.

Misi :

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani dan masyarakat pertanian lainnya tentang PHT.
2. Memfasilitasi, motivasi, dan regulasi untuk terbinanya kemandirian petani dan masyarakat pertanian lainnya dalam pengelolaan OPT hortikultura secara ramah lingkungan.
3. Melindungi petani dan konsumen dari residu pestisida karena penggunaan bahan kimia dalam pengendalian OPT.
4. Meminimalkan pencemaran lingkungan dan mempertahankan keanekaragaman hayati di ekosistem pertanian guna mencapai bioindustri hortikultura.
5. Mengamankan produksi dengan meminimalkan kehilangan hasil produksi akibat serangan OPT.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran**Tujuan**

1. Menekan kehilangan produksi dari serangan OPT;
2. Menekan kehilangan produksi akibat DPI (banjir dan kekeringan); dan
3. Meningkatkan pengelolaan manajemen ketatausahaan.

Sasaran

Sasaran Program Sistem Perlindungan Hortikultura yang akan dicapai Direktorat Perlindungan Hortikultura adalah:

1. Terkendalinya Serangan OPT pada tanaman hortikultura;
2. Penanganan DPI pada tanaman hortikultura; dan
3. Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2023, tim pengelola kinerja satuan kerja agar memastikan target realisasi tahun 2024 lebih besar dari realisasi kinerja tahun 2023. Target dari indikator tujuan rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura tahun 2024 yang awalnya sebesar 95% berubah menjadi 99,65%. Sedangkan target indikator tujuan rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area terkena DPI yang awalnya sebesar 50% berubah menjadi 93,05%.

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		
			2023	2024	2024)*
1.	Menekan kehilangan produksi dari serangan OPT	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	95,00%	95,00%	99,65%
2.	Menekan kehilangan produksi akibat (kebanjiran dan kekeringan)	Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI	50,00%	50,00%	93,05%
3.	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura	3,19 Skala Likert	3,21 Skala Likert	3,21 Skala Likert

)* : Target penyesuaian hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pertanian Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura per bulan Agustus 2024.

2.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan Perlindungan Hortikultura yang akan dilakukan dalam mencapai visi dan misi pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura ramah lingkungan 2020-2024 secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Tanaman Hortikultura Berbasis Sistem PHT;
2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Fasilitasi Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Hortikultura;
3. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perlindungan (BPTPH, Laboratorium PHP/Laboratorium Agens Hayati/Laboratorium Pestisida, Klinik PHT);
4. Peningkatan Pengendalian OPT Hortikultura; dan
5. Penanganan DPI (Banjir dan Kekeringan).

Strategi kebijakan pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura ramah lingkungan 2020-2024, dilaksanakan dalam bentuk penguatan atau pemantapan subsistem-subsistem dalam sistem perlindungan tanaman hortikultura, sebagai berikut:

1. Area Pengendalian OPT Hortikultura

Pemanfaatan pengendali OPT ramah lingkungan dalam pengendalian OPT skala luas pada komoditas prioritas melalui kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT ramah lingkungan. Kegiatan gerdal OPT melibatkan petani secara langsung akan mendukung upaya pengelolaan OPT, agar tidak menimbulkan kerugian secara nyata, menjamin keamanan produk, mutu produk, keselamatan dan kesehatan pelaku pertanian, serta meminimalkan residu pestisida dan bahan berbahaya lain pada produk hortikultura sehingga memenuhi persyaratan keamanan pangan.

2. Peningkatan Peran Kelembagaan Perlindungan Tanaman Hortikultura

Dalam upaya pengendalian OPT sesuai dengan prinsip-prinsip PHT, penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan dengan pemanfaatan Agens Pengendali Hayati (APH)/biopetisida pestisida nabati, perangkat OPT, atraktan dan feromon sex dalam usaha budidaya tanaman sangat diperlukan. Pengembangan dan pemasyarakatan pengendali OPT ramah lingkungan di tingkat petani memerlukan usaha dan komitmen yang kuat. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) Tanaman Pangan dan Hortikultura diharapkan dapat menjadi instalasi perlindungan tanaman yang terstandarisasi serta dapat menyediakan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan dengan memanfaatkan APH/biopestisida, pestisida nabati dan lain sebagainya sesuai kearifan lokal dan spesifik lokasi. Oleh karena itu, diperlukan wadah kegiatan yang digunakan untuk menampung usaha dan keinginan sebagaimana tersebut di atas, melalui Pengembangan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Hortikultura berupa Klinik PHT yang berbasis kelompok tani dan dibina oleh LPHP setempat.

3. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Penerapan penanganan DPI merupakan suatu sarana untuk antisipasi, adaptasi dan mitigasi dalam penanganan DPI melalui pendekatan teknologi/model penanganan untuk meminimalisir kejadian DPI yang disesuaikan dengan kondisi wilayah/lokasi pertanaman. Diperlukan kepedulian pemerintah serta pelaku usaha dalam meminimalisir dampak negatif perubahan iklim.

4. Pemasyarakatan Perlindungan Hortikultura

Pemasyarakatan perlindungan diarahkan untuk meningkatkan kepedulian publik (*public awareness*) terhadap perlindungan hortikultura dengan harapan dapat memperoleh dukungan yang optimal. Publik yang dimaksud adalah



pemerintah/instansi pusat dan daerah, DPR/DPRD, petani, pengusaha, konsumen, pers/media, LSM dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

2.1.4. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi Kebijakan pembangunan pertanian yang mempertahankan kelestarian lingkungan dan kekhawatiran tentang dampak yang tidak diinginkan akibat penggunaan pestisida kimia sintetis, perlu didukung dengan penerapan sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (pasal 48) dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (pasal 3). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura pasal 32 menyebutkan bahwa salah satu sarana hortikultura terdiri atas bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendorong pembangunan hortikultura yang berkelanjutan dilakukan melalui kebijakan pengelolaan hortikultura secara ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengembangkan pemahaman prinsip PHT.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Perlindungan Hortikultura ke dalam program atau kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan dan sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran strategis pada Renstra Tahun 2024 yang telah disepakati di Kementerian Pertanian. Dalam RKT telah ditetapkan target-target yang akan dijadikan ukuran tingkat keberhasilan ataupun kegagalan pencapaiannya. Target Rencana Kinerja Tahunan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	2024	
		Target	Renja
Terkendalinya penyebaran OPT dan	1. Area Pengendalian OPT Hortikultura (ha)	2.500	2.500
	2. Area Penanganan DPI (ha)	200	200



Sasaran Kegiatan	Indikator	2024	
		Target	Renja
DPI pada tanaman komoditas prioritas	3. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan (kegiatan)	24	24
	4. Sarana Perlindungan Hortikultura	50	50

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau kinerja. Ukuran/indikator kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1185/Kpts/OT.140/3/2010. Rincian Output Perlindungan Hortikultura disajikan dalam Tabel 3, sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 3. Rincian Output yang Mendukung Kegiatan Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Target
Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas prioritas	1. Area Pengendalian OPT Hortikultura (ha)	2.500
	2. Area Penanganan DPI (ha)	200
	3. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan (kegiatan)	24
	4. Sarana Perlindungan Hortikultura	50

Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target Minimal
Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura (%)	99,65
	Rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan DPI	93,05



	terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI (%)	
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura (Skala Likert)	3,21

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan bentuk komitmen Pimpinan, Unit Kerja dan Satuan Kerja atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk PK Kementerian Pertanian, PK Direktorat Jenderal Hortikultura (Eselon I), dan PK Direktorat Perlindungan Hortikultura (Eselon II). Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Perlindungan Hortikultura dengan Direktur Jenderal Hortikultura. Kontrak kerja tersebut berupa standar kinerja yang merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024, rincian PK sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Pengendalian serangan OPT terhadap luas tanam Hortikultura	1-1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura (%)	99,65
2.	Penanganan area yang terkena DPI terhadap area yang terkena DPI	2-1	Rasio luas area yang mendapatkan penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI (%)	93,05
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	2-1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan hortikultura (Skala Likert)	3,21

Sasaran strategis Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu: 1) Pengendalian serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura; 2)



Penanganan area terkena DPI terhadap area yang terkena DPI ; dan 3) Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel. Pencapaian sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan pencapaian target indikator kinerja dalam persentase rasio maupun skala likert dari masing-masing sasaran strategis. Target indikator kinerja rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura adalah sebesar 99,65%, sementara untuk target indikator kinerja penanganan area yang terkena DPI terhadap area yang terkena DPI adalah sebesar 93,05% . Adapun target indikator kinerja mengenai tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan hortikultura adalah 3,21 skala likert.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Ukuran kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) dengan membandingkan realisasi dan target yang ditetapkan, serta metode pengukurannya mengacu pada skoring Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura. Metode tersebut mengelompokkan capaian kinerja ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%); 2) berhasil (capaian 80-100%); 3) cukup berhasil (capaian 60-79%); dan 4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024, Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan target kinerja pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Program (SP) dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Salah satu dari 7 (tujuh) Sasaran Program (SP) adalah Terkendalinya Penyebaran OPT dan Penanganan DPI pada Tanaman Komoditas Hortikultura Prioritas, sedangkan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) IKSP merupakan Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura yaitu:

- 1) Rasio Serangan OPT yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura;
- 2) Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapatkan Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI; dan
- 3) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan Ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura yang telah difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada tahun 2024 dilakukan dengan cara: 1) membandingkan target dengan realisasi kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024; 2) membandingkan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya; 3) menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan anggaran; 4) mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi; serta 5) rencana perbaikan Tahun 2024 dan selama periode pelaksanaan Implementasi Renstra Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2020-2024.

Pengambilan data pada Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dilakukan berdasarkan manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:



Sasaran Program (SP) : Terkendalinya Serangan OPT dan penanganan DPI pada Tanaman Hortikultura

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP):

1. Rasio Serangan OPT yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura
Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura adalah upaya pengendalian serangan OPT sesuai sistem PHT dengan memadukan beberapa teknik pengendalian, baik dengan cara: fisik/mekanik, biologis, kultur teknis dan kimiawi pada komoditas utama, sehingga tidak menjadi puso. Adanya pengendalian OPT hortikultura, maka luas tanaman yang terserang OPT akan mengalami perubahan kategori serangan yang terdiri atas kategori serangan ringan, sedang dan berat. Sedangkan yang tidak berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Rasio Luas Serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang (%) diperoleh dengan cara:
 - Menghitung luas serangan OPT hortikultura nasional yang ditangani dengan kategori serangan ringan, sedang, berat, dan puso disebut dengan luas area **terkena**.
 - Menghitung luas serangan OPT tanaman hortikultura yang tidak berhasil dikendalikan menjadi **puso**.
 - Menghitung rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas area hortikultura yang terserang dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum(\text{luas serangan OPT (Terkena - Puso)}) \text{ tahun berjalan } (t)}{\sum(\text{luas serangan OPT (Terkena) tahun berjalan})(t)} \times 100\%$$

2. Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapatkan Penanganan DPI Terhadap Luas Indikator Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan dampak DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI yang mengukur keberhasilan penanganan dampak perubahan iklim pada area hortikultura yang terkena DPI. Area Hortikultura yang Terkena DPI, dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - Mengambil data dan informasi luas area hortikultura yang terkena DPI.
 - Mengambil data dan informasi luas penanganan DPI hortikultura.
 - Menghitung rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI dalam bentuk persentase.

Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI (kebanjiran, kekeringan, puso) diperoleh dengan cara membandingkan luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI pada tahun



berjalan terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI pada tahun berjalan, atau dengan rumus:

$$\frac{\sum(\text{luas area hortikultura (terkena DPI - Puso) saat tahun berjalan (t)})}{\sum(\text{luas area hortikultura (terkena DPI) tahun berjalan (t)})} \times 100\%$$

3. Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura

Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan Ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura merupakan nilai capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan Ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Tingkat kepuasan pegawai diperoleh dengan cara:

- Menentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan internal (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
- Menghitung nilai kepuasan internal untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f), lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
- Menghitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus: $(\sum(fn)) / (\sum f)$
- Menghitung tingkat kepuasan internal untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus: $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
- Menjumlahkan tingkat kepuasan internal untuk seluruh pertanyaan. Tingkat kepuasan harus berada pada range 0 sampai dengan 4.

Kategori Nilai Skala Likert (Permentan Nomor 19 Tahun 2018):

Sangat Puas (SP) = 4

Puas (P) = 3

Tidak Puas (TP) = 2

Sangat Tidak Puas (STP) = 1

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Minimal)	Realisasi	Capaian	Kategori
Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada tanaman hortikultura	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura (%)	99,65	99,69	100,04	Sangat berhasil
	Rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan DPI terhadap	93,05	93,30	100,27	Sangat berhasil



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Minimal)	Realisasi	Capaian	Kategori
	luas area yang terkena DPI (%)				
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura (skala likert)	3,21	3,23	100,62	Sangat Puas

Sumber: Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2024.

Indikator kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: 1) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura; 2) Rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI; dan 3) Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura pada tahun 2024 adalah sebesar 99,69%. Nilai rasio serangan OPT yang ditangani tersebut melampaui target minimal (99,65%), sehingga capaian rasio yang diperoleh sebesar **100,04%** dengan kategori capaian kinerja **'sangat berhasil'**. Rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI pada tahun 2024 adalah sebesar 93,30%. Nilai rasio tersebut melampaui target minimal yang hanya sebesar 93,05%, sehingga capaian rasio penanganan DPI yang diperoleh sebesar **100,27%**, dengan kategori capaian kinerja **'sangat berhasil'**.

Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 diperoleh nilai sebesar 3,23 skala likert. Nilai skala likert tersebut melampaui target minimal yang hanya sebesar 3,21 skala likert. Capaian tingkat kepuasan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang diperoleh sebesar **100,62%**, dengan kategori capaian kinerja **'sangat puas'**. Berdasarkan hasil survei Tingkat Kepuasan Pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura, dari 43 responden terdapat 2 (dua) responden (4,65%) dengan kategori penilaian tidak puas terhadap layanan yang meliputi: 1) kualitas pelayanan berupa fisik/berwujud (kebersihan lingkungan ruang kerja dan fasilitasnya); 2) keandalan dalam layanan administrasi (kepegawaian, keuangan, persuratan, rumah tangga, BMN dan kearsipan); 3) kompetensi dan responsivitas dalam pelaksanaan layanan; 4) kesuaian dan ketepatan penyelesaian masalah layanan; dan 5) inisiatif pegawai dalam memberikan pelayanan. Masih adanya penilaian tidak puas tersebut menjadi motivasi perbaikan layanan ketatausahaan yang



lebih baik untuk membantu dan mempermudah penyelesaian masalah ketatausahaan bagi seluruh pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura di tahun mendatang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelayanan ketatausahaan.

3.2.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja, Direktorat Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 memperoleh kategori capaian kinerja **'sangat berhasil'** untuk indikator kinerja rasio serangan OPT yang ditangani dan rasio luas area yang mendapatkan penanganan DPI. Sedangkan untuk indikator kinerja tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura memperoleh kategori capaian kinerja **'sangat puas'**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 telah berhasil dan melampaui target capaian kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan keseriusan dukungan Direktorat Perlindungan Hortikultura dalam pengamanan dan penyediaan produk hortikultura aman konsumsi dan berdaya saing.

a. Rasio Serangan OPT yang Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura

Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura pada tahun 2024 adalah sebesar 99,69% (Tabel 6). Nilai rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura pada tahun 2024 diperoleh dari data luas serangan OPT komoditas strategis hortikultura yang dilaporkan petugas daerah ke pusat selama 1 (satu) tahun berjalan. Data luas serangan OPT (terkena maupun puso) yang dilaporkan petugas daerah ke pusat pada tahun 2024 adalah sebanyak 31 komoditas hortikultura dengan rincian sebagaimana pada Tabel 7 (tujuh).

Tabel 7. Rasio Serangan OPT yang dapat Ditangani untuk Komoditas Prioritas Hortikultura Tahun 2024

Komoditas	Tahun 2023*)			Tahun 2024		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Alpukat	45,00	0,00	100,00	146,84	-	100,00
Aneka Cabai	20173,83	24,86	99,88	21038,50	2,07	99,99
Anggrek	0,19	0,00	100,00	0,07	-	100,00



Komoditas	Tahun 2023*)			Tahun 2024		
	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Bawang Merah	6976,50	53,61	99,23	6356,37	1,90	99,97
Bawang Putih	151,20	0,00	100,00	93,78	-	100,00
Belimbing	30,32	0,00	100,00	29,01	-	100,00
Buah Naga	237,59	0,10	99,96	313,31	-	100,00
Durian	569,59	0,00	100,00	454,61	-	100,00
Jagung Manis	1207,97	0,00	100,00	1443,91	-	100,00
Jahe	183,09	2,00	98,91	318,18	-	100,00
Jambu Air	27,98	0,00	100,00	22,03	-	100,00
Jambu Biji/Kristal	87,44	0,06	99,93	217,75	1,80	99,17
Jeruk	7249,57	149,75	97,93	13744,13	43,73	99,68
Kelengkeng	87,21	0,00	100,00	115,00	-	100,00
Kentang	2120,08	0,00	100,00	1762,14	-	100,00
Krisan	23,55	0,00	100,00	15,87	-	100,00
Kubis	2996,63	2,00	99,93	2476,11	-	100,00
Kunyit	21,20	0,00	100,00	13,30	-	100,00
Mangga	2615,83	20,81	99,20	3.597,15	-	100,00
Manggis	318,09	0,00	100,00	247,53	-	100,00
Mawar	39,15	0,00	100,00	15,48	-	100,00
Melati	-	-	-	1,20	-	100,00
Melon	120,02	0,50	99,58	371,28	-	100,00
Nanas	185,54	0,70	99,62	123,86	-	100,00
Pepaya	748,30	0,50	99,93	390,55	-	100,00
Pisang	9.842,97	98,74	99,00	10.946,18	161,38	98,53
Rambutan	63,07	0,00	100,00	65,96	-	100,00
Salak	1.989,88	0,00	100,00	1.210,68	-	100,00
Semangka	537,61	0,00	100,00	454,12	-	100,00
Terong	-	-	-	0,10	-	100,00
Tomat	-	-	-	3420,51	1,00	99,97
Total	58.649,40	353,63	99,40	69.405,52	211,88	99,69

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2024.

Berdasarkan Tabel 7 (tujuh) di atas, luas area terkena serangan OPT pada tahun 2024 adalah seluas 69.405,52 ha, lebih tinggi jika dibandingkan dengan luas area terkena OPT pada tahun 2023 (58.649,40 ha). Luas area puso



akibat serangan OPT pada tahun 2024 adalah seluas 211,88 ha, lebih rendah jika dibandingkan dengan luas area puso di tahun 2023 (353,63 ha).

Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura pada tahun 2024 sebesar 99,69%, lebih tinggi 0,29% dari pada rasio serangan OPT tahun 2023 (99,40%). Nilai rasio serangan OPT yang ditangani tersebut melampaui target minimal yang hanya sebesar 99,65%, sehingga capaian rasio yang diperoleh sebesar 100,04%, dengan kategori capaian kinerja 'sangat berhasil'. Hal tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Perlindungan Hortikultura telah berhasil menjalankan kinerjanya dalam mengamankan produk hortikultura akibat serangan OPT, dan berkontribusi terhadap upaya peningkatan ketersediaan produk hortikultura selama tahun 2024.

Rasio Serangan OPT yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura pada tahun 2024 :

$$= \frac{(69.405,52 - 211,88 \text{ ha})}{69.405,52 \text{ ha}} \times 100\%$$

$$= 0,9969 \times 100\%$$

$$= 99,69\%$$

Analisa Kehilangan Hasil Akibat Serangan OPT Tahun 2024

Keberhasilan kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 salah satunya adalah dengan mencegah terjadinya puso akibat serangan OPT. Berdasarkan data laporan hasil pemantauan petugas di daerah, Direktorat Perlindungan Hortikultura mampu menangani dan mencegah terjadinya puso pada lahan hortikultura seluas 69.405,52 ha. Persentase kehilangan hasil pada komoditas strategis hortikultura tahun 2024 sebagai berikut:

- Cabai : estimasi kehilangan hasil akibat serangan OPT sebesar 24.078,61 ton (0,81%) dari total produksi cabai sebesar 2.957.296,61 ton.
- Bawang merah : estimasi kehilangan hasil akibat serangan OPT sebesar 9.992,71 ton (0,48%) dari total produksi cabai sebesar 2.077.624,87 ton.
- Bawang putih : estimasi kehilangan hasil akibat serangan OPT sebesar 81,38 ton (0,21%) dari total produksi cabai sebesar 39.449,84 ton.



Tabel 8. Rasio Serangan OPT Hortikultura yang Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura Tahun 202-2024

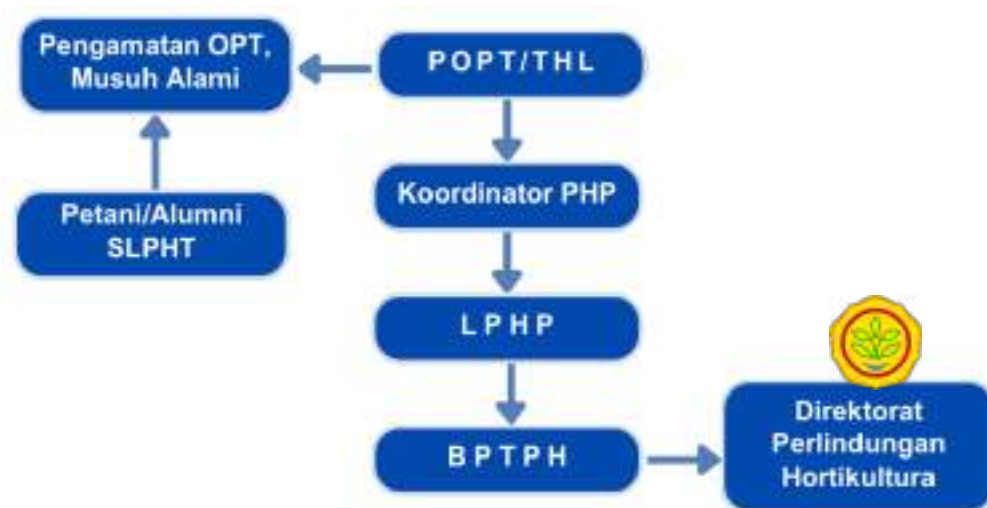
Kategori	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Terkena (ha)	84458,03	109260,11	79542,96	58649,4	69.405,52
Puso (ha)	479,97	565,16	307,83	353,63	211,88
Rasio (%)	99,43	99,30	99,61	99,40	99,69

Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun (2020-2024), nilai rasio serangan OPT hortikultura yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura berturut-turut yaitu sebesar 99,43%, 99,30%, 99,61%, 99,40% dan 99,69%. Nilai rasio tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020-2024 Direktorat Perlindungan Hortikultura telah berkomitmen dan berhasil menjalankan kinerjanya dalam melakukan pengamanan produk hortikultura dari serangan OPT. Data rincian serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura tahun 2020-2024 terlampir dalam Lampiran 7.

Mekanisme/Alur Pelaporan Data OPT

1. POPT/PHP yang bekerja di wilayah pengamatan, membuat laporan hasil pengamatan serangan OPT (Laporan Setengah Bulanan) yang disampaikan kepada Koordinator POPT di Kabupaten/Kota dan Mantri Tani.
2. Koordinator POPT di Kabupaten/Kota melaporkan hasil rekapitulasi data serangan OPT ke LPHP dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
3. Hasil rekapitulasi data serangan OPT dari semua Kabupaten/Kota wilayah kerja LPHP disampaikan ke UPTD BTPPH Provinsi.
4. Hasil rekapitulasi data serangan OPT dari semua LPHP disampaikan ke Direktorat Perlindungan Hortikultura.
5. Periode penyampaian laporan data OPT dari daerah (UPTD BTPPH) ke pusat (Ditlin Hortikultura) dilakukan dalam 2 (dua) periode yaitu laporan periode pertama (tanggal 1-15 bulan berjalan) paling lambat diterima tanggal 20 bulan berjalan, sedangkan Laporan periode kedua (tanggal 16-30/31 bulan berjalan) paling lambat diterima tanggal 4 (empat) bulan berikutnya. Alur pelaporan data OPT sebagai berikut:





Gambar 1. Alur pelaporan data OPT hortikultura

b. Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI

Persentase rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI diperoleh dari jumlah luas area hortikultura yang terkena DPI maupun luas area puso dibandingkan dengan luas area hortikultura yang terkena DPI pada tahun berjalan. Area hortikultura yang terkena DPI pada tahun 2024 yaitu seluas 4.095,94 ha dan area puso seluas 274,24 ha.

Rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI tahun 2024 :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(4.095,94 \text{ ha} - 274,24 \text{ ha})}{4.095,94 \text{ ha}} \times 100\% \\
 &= 0,9330 \text{ ha} \times 100\% \\
 &= 93,30\%
 \end{aligned}$$

Rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI tahun 2024 adalah sebesar 93,30% dari target sebesar 93,05%. Nilai rasio tersebut memperoleh capaian kinerja sebesar 100,26% dengan kategori capaian kinerja 'sangat berhasil'. Rasio luas area penanganan DPI tahun 2024 lebih tinggi 0,48% jika dibandingkan dengan rasio luas area penanganan DPI tahun 2023 (92,82%). Hal tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Perlindungan Hortikultura telah berhasil menjalankan kinerjanya dalam mengamankan produk hortikultura dari resiko kehilangan hasil akibat DPI selama tahun 2024.



Tabel 9. Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI Tahun 2024

Kategori	Komoditas	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (ha)	Puso (ha)	Rasio DPI (%)
Banjir	Sayur	704,50	76,24	89,18	3.288,44	128,17	96,10
	Buah	64,49	4,64	92,81	495,05	143,87	70,94
	Tanaman Obat	2,00	0,00	100,00	2,00	2,00	0,00
Kekeringan	Sayur	193,75	0,50	99,74	310,45	0,20	99,94
	Buah	183,00	1,00	99,45	0,00	0,00	0,00
		1.147,74	82,38	92,82	4.095,94	274,24	93,30

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2024.

Dalam rentang waktu 5 (lima) tahun (2020-2024), nilai rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI berturut-turut yaitu sebesar 76,41% dari target 50% pada tahun 2020; 80,99% dari target 50% pada tahun 2021; 74,65% dari target 50% pada tahun 2022; 92,82% dari target 50,50% pada tahun 2023; dan 93,30% dari target 93,05% pada tahun 2024. Nilai rasio tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020-2024 Direktorat Perlindungan Hortikultura telah berkomitmen dan berhasil menjalankan kinerjanya dalam melakukan penanganan DPI pada area hortikultura yang terkena DPI. Data rincian luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI tahun 2020-2024 terlampir dalam Lampiran 8.



Gambar 2. Luas area penanganan DPI (banjir dan kekeringan) terkena maupun puso pada komoditas hortikultura tahun 2020-2024.



Analisa Kehilangan Hasil Penanganan DPI Tahun 2024

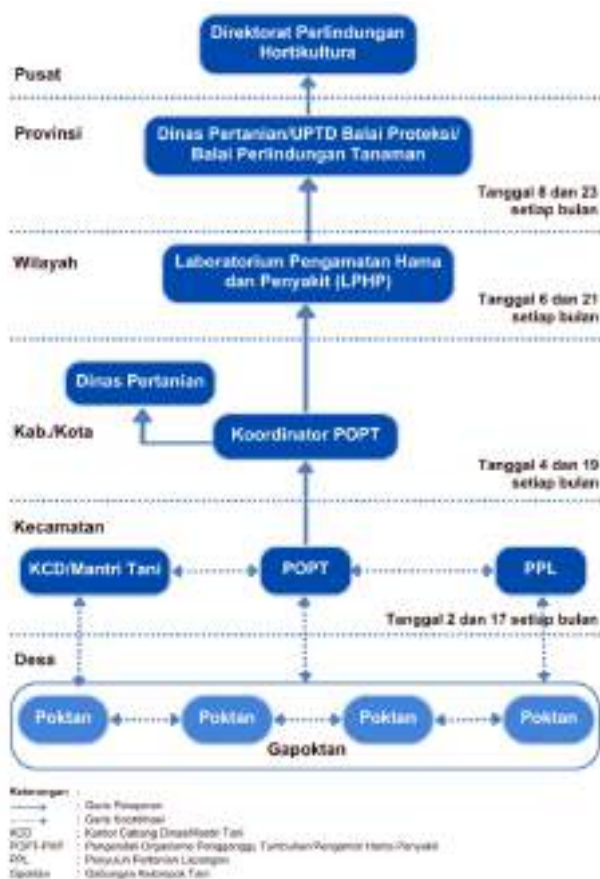
Keberhasilan kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 salah satunya adalah dengan mencegah kehilangan hasil hortikultura akibat DPI. Berdasarkan data laporan hasil pemantauan petugas di daerah, Direktorat Perlindungan Hortikultura mampu menangani dan mencegah terjadinya puso akibat DPI (banjir dan kekeringan) pada lahan hortikultura seluas 4.935,937 ha. Persentase kehilangan hasil pada komoditas strategis hortikultura tahun 2024 sebagai berikut:

- Cabai : persentase kehilangan hasil akibat banjir sebesar 2.054,32 ton (0,07%) dari total produksi cabai sebesar 2.957.296,61 ton. Sedangkan kekeringan tidak menyebabkan kehilangan hasil pada cabai.
- Bawang merah : persentase kehilangan hasil akibat banjir sebesar 149,40 ton (0,01%) dari total produksi cabai sebesar 2.077.624,87 ton. Sedangkan kekeringan tidak menyebabkan kehilangan hasil pada bawang merah.

Alur Pelaporan Data DPI

1. Laporan data DPI (banjir dan kekeringan) hortikultura disampaikan oleh petugas POPT/Mantri Tani/PPL ke Koordinator POPT, kemudian direkapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) tersebut. Hasil rekapitulasi data DPI kemudian dikirim ke Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
2. Hasil rekapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) dari semua Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja LPHP disampaikan ke UPTD BPTPH Provinsi.
3. Hasil rekapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) dari semua LPHP oleh UPTD BPTPH Provinsi disampaikan ke Direktorat Perlindungan Hortikultura.
4. Periode penyampaian laporan data DPI (banjir dan kekeringan) dari UPTD BPTPH Provinsi ke Direktorat Perlindungan Hortikultura dilakukan dalam 2 periode yaitu Laporan Periode I (tanggal 23 bulan berjalan) dan Laporan Periode II (tanggal 8 bulan berikutnya).





Gambar 3. Alur pelaporan data DPI

3.2.2. Perbandingan Target Kinerja

Perbandingan target kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada berikut:

Tabel 10. Perbandingan Target Kinerja Tahun 2020-2024

No.	Penetapan Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Area Pengendalian OPT Hortikultura (ha)	5.000	5.426	6.000	6.295	2.500
2	Area Penanganan DPI (ha)	75	75	210	325	200
3	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan (kegiatan)	-	10	20	20	24
4	Sarana Perlindungan Hortikultura (unit)	-	-	-	-	50

Berdasarkan Tabel 9 di atas terlihat adanya perbedaan target kinerja antara 4 (empat) penetapan kinerja pada tahun 2024 dengan tahun 2023. Target kinerja untuk Area Pengendalian Hortikultura pada tahun 2024 adalah seluas 2.500 ha, lebih rendah jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 yaitu



seluas 6.295 ha. Target kinerja untuk Area Penanganan DPI tahun 2024 adalah seluas 200 ha, lebih rendah jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 yaitu seluas 325 ha.

Target kinerja untuk Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan tahun 2024 sebanyak 24 kegiatan lebih tinggi yaitu seluas 200 ha jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 yaitu seluas 325 ha. Sedangkan untuk indikator kinerja Sarana Perlindungan Hortikultura merupakan rincian output baru pada penetapan kinerja tahun 2024 dengan target sebanyak 50 unit.

3.3. Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mendukung pengamanan dan peningkatan produksi hortikultura aman konsumsi, bermutu dan ramah lingkungan, Direktorat Perlindungan Hortikultura mengimplementasikan Renstra Perlindungan Hortikultura Tahun 2020-2024 melalui kegiatan utama dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

3.3.1. Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Indikator kinerja utama Direktorat Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) kegiatan utama yaitu: 1) Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan; 2) Area Pengendalian OPT Hortikultura; 3) Area Penanganan DPI Hortikultura; dan 4) Sarana Perlindungan Hortikultura. Realisasi fisik dan keuangan kinerja utama terdapat pada tabel berikut:

Tabel 11. Realisasi Fisik Kinerja Utama Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan (Kegiatan)	24	24	100
1773.RAI.010 Area pengendalian OPT Hortikultura (Ha)	2.500	2.500	100
1773.RAI.013 Area Penanganan DPI Hortikultura (Ha)	200	200	100
1773.RAI.014 Sarana Perlindungan Hortikultura (Unit)	50	50	100

Berdasarkan data pada Tabel 10 di atas, masing-masing komponen IKU dapat melaksanakan seluruh target yang telah ditetapkan sehingga capaian realisasi fisik Direktorat Perlindungan Hortikultura dari seluruh IKU tahun 2024 sebesar 100%. Adapun rincian capaian realisasi fisik tersebut yaitu 24 kegiatan (100%) untuk realisasi Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan



Pelaporan; 2.500 Ha (100%) untuk realisasi Area pengendalian OPT Hortikultura; 200 Ha (100%) untuk realisasi Area Penanganan DPI Hortikultura; dan 50 unit (100%) untuk realisasi Sarana Perlindungan Hortikultura.

Tabel 12. Realisasi Keuangan Kinerja Utama Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 (*data update 24 Januari 2025*)

Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (%)	
				Terhadap Pagu	Jika Mempertimbangkan Blokir
1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	6.000.000.000	5.201.580.446	796.344.000	86,69	99,96
1773.RAI.010 Area Pengendalian OPT Hortikultura	10.000.000.000	9.374.550.119	620.359.000	93,76	99,95
1773.RAI.013 Area Penanganan DPI Hortikultura	5.000.000.000	4.950.544.355	49.297.000	99,01	100,00
1773.RAI.014 Sarana Perlindungan Hortikultura	4.000.000.000	3.960.949.125	34.000.000	99,02	99,87
Total	25.000.000.000	23.487.624.045	1.500.000.000	93,95	99,95

Pelaksanaan kinerja utama Direktorat Perlindungan Hortikultura tahun 2024 didukung dengan Pagu anggaran awal senilai Rp25.000.000.000, namun terjadi blokir penghematan perjalanan dinas 50% senilai Rp1.500.000.000. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, sebagaimana terdapat pada Tabel 11 di atas realisasi keuangan Direktorat Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 adalah senilai Rp23.487.624.045 yaitu sebesar 93,95% dari pagu awal. Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas, maka realisasi keuangan sebesar 99,95%.

a. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan (1773.AEA.013)

Pada kegiatan perlindungan hortikultura, aktivitas bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan di semua aspek kegiatan. Kegiatan Bimbingan Teknis, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Hortikultura yaitu sebanyak 24 kegiatan. Alokasi anggaran (pagu awal) untuk



pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan adalah senilai Rp6.000.000.000, namun karena terjadi blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp796.344.000, maka anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan adalah senilai Rp5.203.656.000.

Capaian realisasi keuangan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan adalah senilai Rp5.201.580.446, yaitu sebesar 86,69%. Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp796.344.000, maka realisasi keuangan menjadi sebesar 99,96%. Sedangkan capaian realisasi fisik adalah 24 kegiatan (100%) dari target 24 kegiatan, dengan kategori capaian 'berhasil'. Adapun rincian pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Teknis penguatan klinik PHT dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- 2) Bimbingan Teknis Pengelolaan OPT Buah dan Florikultura dilaksanakan di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
- 3) Bimbingan Teknis/Sosialisasi *Area Wide Management (AWM)* Lalat Buah pada Salak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Bimbingan Teknis Pengelolaan OPT Utama pada Buah Potensi Ekspor (Durian) di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- 5) Bimbingan Teknis Pengelolaan OPT Utama pada Buah Potensi Ekspor (Salak) di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Surveillans OPT Sayuran dan Tanaman Obat untuk Penyiapan *Pest List* dilaksanakan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Surveillans OPT Buah dan Florikultura untuk Penyiapan *Pest List* dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
- 8) Temu Koordinasi Pelaksanaan Bimtek/Temu Koordinasi/Peningkatan Kapasitas Petani dalam Rangka Mendukung Produksi Padi, Jagung dan Hortikultura dilaksanakan di 6 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan), Provinsi Jambi (Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur), Provinsi Lampung (Kabupaten Pesisir Barat), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Sumedang), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Blora), dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Jeneponto dan Maros);
- 9) Temu Koordinasi Bimbingan Teknis Adhoc Kementerian Pertanian dilaksanakan di Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Selatan) dan Provinsi Jambi (Kabupaten Batang Hari);



- 10) Bimbingan Teknis Pengelolaan OPT Bawang Merah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Indramayu) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Bima);
- 11) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan OPT Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan di Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Brebes), Provinsi Jawa Barat (Kota Bogor), Provinsi Banten (Kabupaten Serang), dan Provinsi Bengkulu (Kabupaten Kepahiang);
- 12) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Data OPT dan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Tanggamus, Provinsi Lampung;
- 13) Bimbingan Teknis Pengelolaan OPT dilaksanakan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok);
- 14) Pendampingan/Pengawasan/Monev Gerdal OPT (LPHP) dilaksanakan di 7 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Majalengka, Cirebon, Bandung, Garut dan Sumedang), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Grobogan, Demak, Kendal, Pati, Banjarnegara, dan Brebes), Provinsi D.I. Yogyakarta (Kabupaten Sleman dan Kulonprogo), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Malang, Banyuwangi, Nganjuk, dan Probolinggo), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur), dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Enrekang);
- 15) Pendampingan/Pengawasan/Monev Gerdal OPT (BPTPH) dilaksanakan di 7 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Majalengka, Cirebon, Bandung, Garut dan Sumedang), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Grobogan, Demak, Kendal, Pati, Banjarnegara, dan Brebes), Provinsi D.I. Yogyakarta (Kabupaten Sleman dan Kulonprogo), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Malang, Banyuwangi, Nganjuk, dan Probolinggo), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur), dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Enrekang);
- 16) Pendampingan/Pengawasan/Monev Gerdal OPT (Pusat) dilaksanakan di 7 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Majalengka, Cirebon, Bandung, Garut dan Sumedang), Provinsi Jawa Tengah

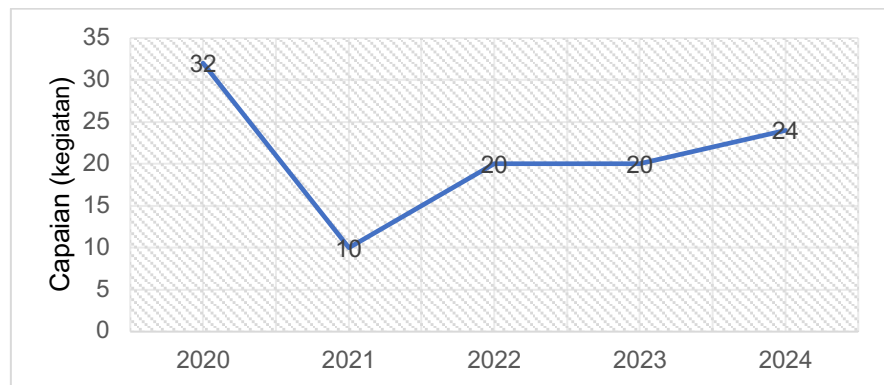


- (Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Grobogan, Demak, Kendal, Pati, Banjarnegara, dan Brebes), Provinsi D.I. Yogyakarta (Kabupaten Sleman dan Kulonprogo), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Malang, Banyuwangi, Nganjuk, dan Probolinggo), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur), dan Provinsi Sulawesi Utara (Kabupaten Enrekang);
- 17) Pendampingan/Monitoring Mikroba Intensif dilaksanakan di 4 lokasi yaitu Provinsi Jawa Barat Barat (Bogor, Depok), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Brebes), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Nganjuk);
 - 18) Pendampingan/Pengawasan/Monev Kegiatan Penanganan DPI (BTPH/Provinsi) dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Maiwa dan Enrekang), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Nganjuk, Malang, Probolinggo), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Pati, Grobogan, Demak), Provinsi D.I. Yogyakarta (Kabupaten Sleman dan Kulon Progo), dan Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Sumedang dan Garut);
 - 19) Pendampingan/Pengawasan/Monev Kegiatan Penanganan DPI (LPHP/Kabupaten) dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Maiwa dan Enrekang), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Nganjuk, Malang, Probolinggo), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Pati, Grobogan, Demak, Banjarnegara, Kendal, Kebumen), Provinsi DI Yogyakarta (Kabupaten Sleman dan Kulon Progo), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Sumedang, Garut, Cirebon), dan Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok dan Agam);
 - 20) Pendampingan/Pengawasan/Monev Kegiatan Penanganan DPI (Pusat) dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat (Bogor, Cianjur, Majalengka, Cirebon, Sumedang, Bandung, Garut, Subang), Provinsi Jawa Tengah (Magelang, Banjarnegara, Demak, Grobogan, Pati, Brebes, Kebumen), Provinsi D.I. Yogyakarta (Sleman, Kulonprogo), Jawa Timur (Nganjuk, Malang, Probolinggo), Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang dan Maiwa), Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok dan Agam), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur);
 - 21) Pendampingan/Pembinaan Kampung Perlindungan Hortikultura dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang), Provinsi D.I. Yogyakarta (Kabupaten Bantul), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Banjarnegara), dan Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Garut)



- 22) Monev Fasilitas Pengendali OPT Ramah Lingkungan dilaksanakan di 3 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan (Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang), Kalimantan Selatan (Kabupaten Banjarbaru) dan Bengkulu (Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong);
- 23) Koordinasi, Inventarisasi Adaptasi/Mitigasi DPI Hortikultura dilaksanakan di Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 24) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan OPT Buah dan Florikultura dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Majalengka, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang), Provinsi Banten (Kota Tangerang), Jawa Tengah (Kabupaten Magelang dan Banjarnegara).

Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan tahun 2024 sebanyak 24 kegiatan, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelaksanaan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 20 kegiatan. Mengingat tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam Implementasi Renstra Direktorat Perlindungan Hortikultura, berikut grafik capaian pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan pada tahun 2020-2024:



Gambar 4. Grafik capaian pelaksanaan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan pada tahun 2020-2024.

b. Area Pengendalian OPT Hortikultura (1773.RAI.010)

Area Pengendalian OPT Hortikultura merupakan kegiatan utama Direktorat Perlindungan Hortikultura TA 2024 yang bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan serangan OPT pada pertanaman hortikultura. Upaya pengendalian OPT dapat dilakukan secara preventif (pencegahan)



maupun kuratif (telah terjadi serangan) berdasarkan hasil pengamatan OPT yang dilakukan oleh petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). Kegiatan area pengendalian OPT hortikultura pada tahun 2024 dilaksanakan melalui komponen kegiatan persiapan, fasilitasi pengendalian OPT hortikultura, pendampingan dan pengawalan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Area Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024 adalah senilai Rp10.000.000.000 (pagu awal), namun terjadi blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp620.359.000 sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah senilai Rp9.379.641.000. Capaian realisasi keuangan untuk pelaksanaan Area Pengendalian OPT Hortikultura tahun 2024 adalah senilai Rp9.374.550.119, yaitu sebesar 93,75% dari pagu awal senilai Rp10.000.000.000. Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp620.359.000, maka realisasi keuangan menjadi sebesar 99,95% dengan kategori capaian kinerja 'berhasil'.

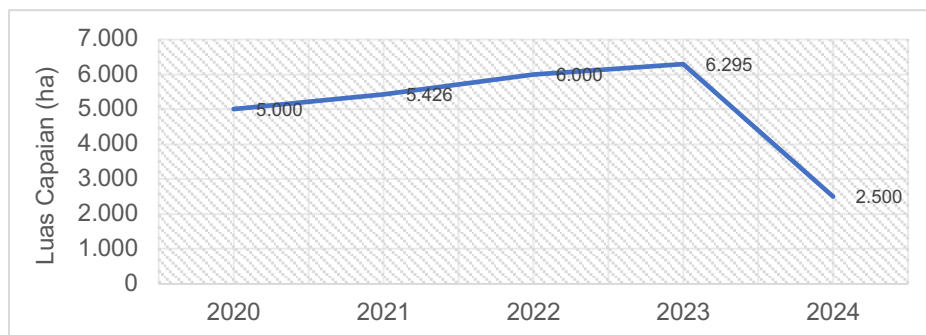
Tabel 13. Capaian Realisasi Target Kegiatan Area Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2020-2024

Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Capaian (ha)	Realisasi (%)		Kategori
			Keuangan	Fisik	
Area Pengendalian OPT Hortikultura	2020	5.000	99,83	100	Berhasil
	2021	5.426	99,71	100	Berhasil
	2022	6.000	99,51	100	Berhasil
	2023	6.295	99,57	100	Berhasil
	2024	2.500	99,96*	100	Berhasil

*: Realisasi keuangan dengan mempertimbangkan blokir

Realisasi capaian pelaksanaan Area Pengendalian OPT Hortikultura pada tahun 2024 (99,95%) jika dengan mempertimbangkan terjadinya blokir penghematan perjalanan dinas, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana termuat dalam tabel di atas. Mengingat tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam Implementasi Renstra Direktorat Perlindungan Hortikultura, berikut grafik capaian pelaksanaan kegiatan Area Pengendalian OPT Hortikultura pada tahun 2020-2024:





Gambar 5. Grafik capaian pelaksanaan kegiatan Area Pengendalian OPT Hortikultura pada tahun 2020-2024.

1) Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura

Kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT Hortikultura merupakan satu kesatuan kegiatan pengendalian OPT di lapang, dengan output luas lahan gerdal dalam satuan hektar (ha). Pelaksanaan Gerdal OPT dilakukan oleh petani/kelompok tani dan didampingi oleh pelaku perlindungan (BTPH/LPHP), serta difasilitasi bahan pengendali OPT ramah lingkungan. Tujuan kegiatan Gerdal OPT diantaranya: 1) sosialisasi pengelolaan OPT ramah lingkungan; 2) pengendalian secara preemtif (pencegahan) dan kuratif (setelah terjadi serangan); 3) menurunkan populasi dan/atau intensitas serangan OPT pada komoditas hortikultura baik tanaman sayuran, buah, florikultura dan tanaman obat.

Kegiatan Gerdal OPT tersebut dilaksanakan untuk tanaman sayuran yaitu cabai dan bawang merah pada kelompok tani yang bermitra dengan champion di 7 (tujuh) provinsi di 26 Kabupaten. Tujuh provinsi tersebut yaitu provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Tabel 14. Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Area Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024

No.	Provinsi / Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Target (ha)	Realisasi		Kategori
			Rp	%		ha	%	
1	Sumatera Barat	353.100.000	353.100.000	100	165	165	100	Berhasil
2	Jawa Barat	964.680.000	964.680.000	100	465	465	100	Berhasil
3	Jawa Tengah	2.835.500.000	2.835.500.000	100	1.325	1.325	100	Berhasil
4	DI Yogyakarta	171.200.000	171.200.000	100	80	80	100	Berhasil
5	Jawa Timur	438.700.000	438.700.000	100	205	205	100	Berhasil
6	Sulawesi Selatan	246.100.000	246.100.000	100	115	115	100	Berhasil
7	Nusa Tenggara Barat	310.300.000	310.300.000	100	145	145	100	Berhasil



No.	Provinsi / Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Target (ha)	Realisasi		Kategori
			Rp	%		ha	%	
	Total	5.319.580.000	5.319.580.000	100	2.500	2.500	100	

Sumber : Realisasi per 24 Januari 2025 sesuai OMSPAN.

Pelaksanaan gerdal OPT hortikultura tahun 2024 memiliki pagu anggaran senilai Rp5.319.580.000 yang dialokasikan untuk gerdal OPT tanaman sayuran yaitu cabai dan bawang merah tersebar di 26 kabupaten di 7 (tujuh) provinsi yaitu provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Realisasi keuangan kegiatan gerdal OPT tahun 2024 tersebut senilai Rp 5.319.580.000 (100%), sedangkan untuk realisasi fisik gerdal OPT seluas 2.500 ha (100%) dengan kategori capaian kinerja berhasil.

Rincian target dan realisasi dari pelaksanaan kegiatan gerdal OPT tahun 2024 di masing-masing provinsi sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Target dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Area Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024

No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Target (ha)	Realisasi		Kategori
						ha	%	
1	Sumatera Barat	1.	Solok	Cabai	15	15	100,00	Berhasil
				Bawang Merah	150	150	100,00	Berhasil
2	Jawa Barat	2.	Cianjur	Cabai	35	35	100,00	Berhasil
		3.	Sukabumi	Cabai	40	40	100,00	Berhasil
		4.	Majalengka	Bawang Merah	70	70	100,00	Berhasil
		5.	Cirebon	Bawang Merah	65	65	100,00	Berhasil
		6.	Bandung	Cabai	25	25	100,00	Berhasil
				Bawang Merah	100	100	100,00	Berhasil
		7.	Garut	Cabai	35	35	100,00	Berhasil
				Bawang Merah	60	60	100,00	Berhasil
8.	Sumedang	Cabai	35	35	100,00	Berhasil		
3	Jawa Tengah	9.	Magelang	Cabai	150	150	100,00	Berhasil
		10.	Temanggung	Cabai	75	75	100,00	Berhasil
				Bawang Merah	140	140	100,00	Berhasil
		11.	Wonosobo	Cabai	5	5	100,00	Berhasil
		12.	Kebumen	Cabai	25	25	100,00	Berhasil
		13.	Grobogan	Bawang Merah	100	100	100,00	Berhasil
14.	Demak	Bawang Merah	100	100	100,00	Berhasil		



No	Provinsi	Kabupaten		Komoditas	Target (ha)	Realisasi		Kategori
						ha	%	
		15.	Kendal	Bawang Merah	100	100	100,00	Berhasil
		16.	Pati	Bawang Merah	100	100	100,00	Berhasil
		17.	Banjarnegara	Cabai	90	90	100,00	Berhasil
		18.	Brebes	Bawang Merah	440	440	100,00	Berhasil
4	DIY	19.	Sleman	Cabai	50	50	100,00	Berhasil
		20.	Bantul	Cabai	30	30	100,00	Berhasil
5	Jawa Timur	21.	Malang	Cabai	10	10	100,00	Berhasil
		22.	Banyuwangi	Cabai	10	10	100,00	Berhasil
		23.	Nganjuk	Bawang Merah	85	85	100,00	Berhasil
		24.	Probolinggo	Bawang Merah	100	100	100,00	Berhasil
6	Nusa Tenggara Barat	25.	Lombok Timur	Bawang Merah	145	145	100,00	Berhasil
7	Sulawesi Selatan	26.	Enrekang	Cabai	25	25	100,00	Berhasil
				Bawang Merah	90	90	100,00	Berhasil
Total					2.500	2.500	100,00	



Gambar 6. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura Tahun 2024



2) Fasilitas Pengendali OPT Hortikultura

Fasilitas pengendali OPT hortikultura Tahun 2024 merupakan kegiatan pendukung IKU area pengendalian OPT hortikultura yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu fasilitas pengendali OPT pada lokasi terdampak banjir, fasilitas pengendali OPT bawang merah ramah lingkungan, fasilitas pengendali OPT alat buah ramah lingkungan, dan fasilitas bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP.

(1). Fasilitas Pengendali OPT pada Lokasi Terdampak Banjir di Kabupaten Aceh Selatan

Fasilitas pengendali OPT pada lokasi terdampak banjir di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 dialokasikan untuk kelompok tani yang lahannya terkena banjir. Untuk penanaman berikutnya setelah banjir, Direktorat Perlindungan Hortikultura memberikan fasilitas berupa agens hayati *Trichoderma* sp. dengan merek dagang Tricho Zia 1.0 WS. Fasilitas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan unsur hara tanah pasca banjir. Capaian realisasi keuangan kegiatan fasilitas pengendali OPT pada lokasi terdampak banjir pada tahun 2024 senilai Rp.55.691.286 (99,98%) dari pagu anggaran senilai Rp.55.700.000, sedangkan realisasi fisik kegiatan fasilitas tersebut seluas 54 ha (100%) dari target seluas 54 ha.



Gambar 7. Distribusi Fasilitas Pengendali OPT pada Lokasi Terdampak Banjir di Kabupaten Aceh Selatan.

(2). Fasilitas Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan

Fasilitas Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan Tahun 2024 dialokasikan untuk mengendalikan OPT bawang merah secara ramah lingkungan. Fasilitas diberikan kepada kelompok tani bawang merah di 6 (enam) provinsi yaitu provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bali, dan Maluku Utara dalam bentuk bahan pengendali OPT dengan merek dagang Primadeco WP, Paenamaxi WP, dan Fero BWG.



Capaian realisasi keuangan kegiatan Fasilitas Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan pada tahun 2024 senilai Rp 228.780,200 (100%) dari pagu anggaran senilai Rp 228.780.200, sedangkan realisasi fisik kegiatan fasilitas tersebut sebanyak 8.360 sachet (100%) dari target sebanyak 8.360 sachet.



Gambar 8. Serah terima Fasilitas Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan

(3). Fasilitas Pengendali OPT Cabai Ramah Lingkungan

Fasilitas Pengendali OPT Cabai Ramah Lingkungan tahun 2024 dialokasikan untuk mengendalikan OPT pada cabai secara ramah lingkungan. Fasilitas diberikan kepada kelompok tani di 9 (sembilan) provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara dalam bentuk bahan pengendali OPT dengan merek dagang Vertiplus WP dan Metarizep WP.

Capaian realisasi keuangan kegiatan Fasilitas Pengendali OPT Cabai Ramah Lingkungan pada tahun 2024 senilai Rp466.520.640 (100%) dari pagu anggaran senilai Rp466.520.640, sedangkan realisasi fisik kegiatan fasilitas tersebut sebanyak 14.772 sachet (100%) dari target sebanyak 14.772 sachet.





Gambar 9. Fasilitas pengendali OPT cabai tahun 2024

(4). Fasilitas Pengendali OPT Lalat Buah Ramah Lingkungan

Fasilitas pengendali OPT lalat buah ramah lingkungan tahun 2024 dialokasikan sebagai bentuk dukungan kegiatan pengendalian skala luas atau *Area Wide Management (AWM)* pada lalat buah pada komoditas salak. Fasilitas diberikan kepada Gapoktan dan kelompok tani di 3 (tiga) lokasi yaitu: Kabupaten Magelang dan Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta dalam bentuk protein hidrolisat.

Capaian realisasi keuangan kegiatan fasilitas pengendali OPT lalat buah ramah lingkungan pada tahun 2024 senilai Rp49.950.000 (100%) dari pagu anggaran senilai Rp49.950.000, sedangkan realisasi fisik kegiatan fasilitas tersebut sejumlah 330 liter (100%) dari target 330 liter.



Gambar 10. Kegiatan pemanfaatan fasilitas pengendali OPT lalat buah ramah lingkungan pada komoditas salak di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.

(5). Fasilitas Pengendali OPT Ramah Lingkungan

Fasilitas Pengendali OPT Ramah Lingkungan tahun 2024 dialokasikan untuk mengendalikan OPT tanaman bawang merah secara ramah lingkungan. Fasilitas diberikan kepada petani di 6 (enam) provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bali, dan Maluku Utara dalam bentuk perangkap likat kuning untuk mengendalikan OPT bawang merah.



Capaian realisasi keuangan kegiatan fasilitasi Pengendali OPT Ramah Lingkungan pada tahun 2024 senilai Rp53.321.000 (100%) dari pagu anggaran senilai Rp53.321.000, sedangkan realisasi fisik kegiatan fasilitasi tersebut sebanyak 3.800 pieces (100%) dari target sebanyak 3.800 pieces.



Gambar 11. Fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan tahun 2024 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Bali.

(6). Fasilitasi Bahan Pengendali OPT Untuk Cadangan LPHP

Fasilitasi bahan pengendali OPT untuk cadangan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) tahun 2024 dialokasikan dalam rangka mendukung peningkatan ketersediaan bahan pengendali OPT hortikultura ramah lingkungan serta meningkatkan peran dan fungsi LPHP sebagai suatu lembaga layanan perlindungan tanaman. Fasilitasi diberikan dalam bentuk bahan baku untuk pembuatan pengendali OPT yaitu agens hayati *Trichoderma* spp. dan *Plant Growth Promoting Rhizobacteria* (PGPR).

Penerima fasilitasi bahan pengendali OPT adalah LPHP/Laboratorium Agens Hayati (LAH)/Instalasi Laboratorium Agens Hayati (ILAH)/Instalasi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian (IP3OPT)/Satuan Pelayanan (SatPel)/Wilayah Kerja (WilKer) yang merupakan institusi perlindungan tanaman di tingkat lapangan di bawah pembinaan dan koordinasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BTPH) di tingkat provinsi. Fasilitasi bahan



pengendali OPT dialokasikan untuk 54 LPHP yang tersebar di 26 provinsi sentra hortikultura sebagaimana teruat dalam tabel berikut:

Tabel 16. Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Fasilitas Bahan Pengendali OPT untuk Cadangan LPHP Tahun 2024

No.	Provinsi	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Target (LPHP)	Realisasi Fisik		Kategori
			Rp	%		LPHP	%	
1	Aceh	60.000.000	60.000.000	100,00	4	4	100,00	Berhasil
2	Sumatera Utara	45.000.000	45.000.000	100,00	3	3	100,00	Berhasil
3	Sumatera Barat	45.000.000	44.985.000	99,97	3	3	100,00	Berhasil
4	Riau	15.000.000	14.977.000	99,85	1	1	100,00	Berhasil
5	Sumatera Selatan	30.000.000	30.000.000	100,00	2	2	100,00	Berhasil
6	Jambi	15.000.000	14.995.000	99,97	1	1	100,00	Berhasil
7	Bengkulu	15.000.000	14.997.000	99,98	1	1	100,00	Berhasil
8	Lampung	45.000.000	45.000.000	100,00	3	3	100,00	Berhasil
9	Bangka Belitung	15.000.000	15.000.000	100,00	1	1	100,00	Berhasil
10	Banten	30.000.000	30.000.000	100,00	2	2	100,00	Berhasil
11	Jawa Barat	30.000.000	30.000.000	100,00	2	2	100,00	Berhasil
12	Jawa Timur	75.000.000	75.000.000	100,00	5	5	100,00	Berhasil
13	Bali	30.000.000	30.000.000	100,00	2	2	100,00	Berhasil
14	Nusa Tenggara Barat	15.000.000	15.000.000	100,00	1	1	100,00	Berhasil
15	Nusa Tenggara Timur	15.000.000	15.000.000	100,00	1	1	100,00	Berhasil
16	Kalimantan Barat	30.000.000	29.998.000	99,99	2	2	100,00	Berhasil
17	Kalimantan Tengah	30.000.000	30.000.000	100,00	2	2	100,00	Berhasil
18	Kalimantan Selatan	30.000.000	30.000.000	100,00	2	2	100,00	Berhasil
19	Kalimantan Timur	15.000.000	15.000.000	100,00	1	1	100,00	Berhasil
20	Sulawesi Utara	45.000.000	44.964.000	99,92	3	3	100,00	Berhasil



No.	Provinsi	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Target (LPHP)	Realisasi Fisik		Kategori
			Rp	%		LPHP	%	
21	Sulawesi Tengah	45.000.000	45.000.000	100,00	3	3	100,00	Berhasil
22	Sulawesi Barat	15.000.000	15.000.000	100,00	1	1	100,00	Berhasil
23	Sulawesi Tenggara	15.000.000	15.000.000	100,00	1	1	100,00	Berhasil
24	Sulawesi Selatan	60.000.000	59.994.200	99,99	4	4	100,00	Berhasil
25	Gorontalo	30.000.000	29.995.000	99,98	2	2	100,00	Berhasil
26	Maluku	15.000.000	15.000.000	100,00	1	1	100,00	Berhasil
Total		810.000.000	809.905.200	99,99	54	54	100,00	

Tabel 17. Rincian Target dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bahan Pengendali OPT sebagai Cadangan LPHP Tahun 2024

No	Provinsi	LPHP/LAH	Volume (Unit)		Kategori
			Target	Realisasi	
1.	Aceh	1. LPHP Keumala - Pidie	1	1	Berhasil
		2. LPHP Pulo le - Nagan Raya	1	1	Berhasil
		3. LPHP Peureulak - Aceh Timur	1	1	Berhasil
		4. LPHP Banda Aceh	1	1	Berhasil
2.	Sumatera Utara	5. LPHP / AH Tanjung Morawa	1	1	Berhasil
		6. LPHP / AH Pematang Kerasan	1	1	Berhasil
		7. LPHP / AH Medan Johor	1	1	Berhasil
3.	Sumatera Barat	8. LPHP-PAH Bandar Buat	1	1	Berhasil
		9. LPHP-PAH Bukittinggi	1	1	Berhasil
		10. LPHP-PAH Sukomananti	1	1	Berhasil
4.	Riau	11. LPHP Pekanbaru	1	1	Berhasil
5.	Sumatera Selatan	12. LPHP Sukarame	1	1	Berhasil
		13. LPHP Tugumulyo	1	1	Berhasil



No	Provinsi	LPHP/LAH	Volume (Unit)		Kategori
			Target	Realisasi	
6.	Jambi	14. LPHP Sungai Tiga	1	1	Berhasil
7.	Bengkulu	15. LPHP UPTD PTPHP	1	1	Berhasil
8.	Lampung	16. LPHP Trimurjo	1	1	Berhasil
		17. LPTHP Semuli Raya	1	1	Berhasil
		18. LPTHP Gadingrejo	1	1	Berhasil
9.	Bangka Belitung	19. LPHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	1	Berhasil
10.	Banten	20. LPHP Wilayah I Serang	1	1	Berhasil
		21. LPHP Wilayah II Pandeglang	1	1	Berhasil
11.	Jawa Barat	22. Satuan Pelayanan BPTPH Wilayan II Subang	1	1	Berhasil
		23. Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah V Tasikmalaya	1	1	Berhasil
12.	Jawa Timur	24. LAH UPT Proteksi T{H Jawa Timur	1	1	Berhasil
		25. Wilayah Kerja UPT Proteksi TPH Madiun	1	1	Berhasil
		26. Wilayah Kerja UPT Proteksi TPH Pemekasan	1	1	Berhasil
		27. Wilayah Kerja UPT Proteksi TPH Mojokerto	1	1	Berhasil
		28. Wilayah Kerja UPT Proteksi TPH Bojonegoro	1	1	Berhasil
13.	Bali	29. LPHP Celuk	1	1	Berhasil
		30. LPHPTanguwisia	1	1	Berhasil
14.	Nusa Tenggara Barat	31. LPHP Sumbawa	1	1	Berhasil
15.	Nusa Tenggara Timur	32. LPHP UPTD Proteksi TPHP Provinsi NTT	1	1	Berhasil
16.	Kalimantan Barat	33. LPHP Sambas	1	1	Berhasil
		34. LPHP Pontianak	1	1	Berhasil
17.	Kalimantan Tengah	35. LPHP Mampai	1	1	Berhasil
		36. LAH Palangka Raya	1	1	Berhasil



No	Provinsi	LPHP/LAH	Volume (Unit)		Kategori
			Target	Realisasi	
18.	Kalimantan Selatan	37. LPHP Sungai Raya	1	1	Berhasil
		38. LPHP Sungai Tabuk	1	1	Berhasil
19.	Kalimantan Timur	39. LAH UPTD Proteksi TPH Provinsi Kalimantan Timur	1	1	Berhasil
20.	Sulawesi Utara	40. LPHP Mongkonai	1	1	Berhasil
		41. LPHP Tumpaan	1	1	Berhasil
		42. LPHP Tondano	1	1	Berhasil
21.	Sulawesi Tengah	43. Instalasi Laboratorium Agens Hayati Ginunggung	1	1	Berhasil
		44. Instalasi Laboratorium Agens Hayati Lembo Makmur	1	1	Berhasil
		45. LPHP Toili	1	1	Berhasil
22.	Sulawesi Barat	46. LAH BTPH Sulawesi Barat	1	1	Berhasil
23.	Sulawesi Tenggara	47. LUPH UPTD BTPH Provinsi Sulawesi Tenggara	1	1	Berhasil
24.	Sulawesi Selatan	48. IP3OPT Maros	1	1	Berhasil
		49. IP3OPT Bulukumba	1	1	Berhasil
		50. IP3OPT Luwu	1	1	Berhasil
		51. IP3OPT Bone	1	1	Berhasil
25.	Gorontalo	52. IP3OPT Kabia	1	1	Berhasil
		53. IP3OPT Limboto	1	1	Berhasil
26.	Maluku	54. LPHP Kairatu	1	1	Berhasil
Total			54	54	

Capaian realisasi keuangan kegiatan fasilitasi bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP pada tahun 2024 senilai Rp809.905.200 (99,99%) dari pagu anggaran senilai Rp810.000.000, sedangkan realisasi fisik kegiatan fasilitasi tersebut adalah 54 LPHP (100%) dari target 54 LPHP.



Serah terima bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP



Pemanfaatan pembuatan PGPR dan *Trichoderma* sp. di laboratorium



Produk jadi *Trichoderma* sp. dan PGPR

Gambar 12. Serah terima bahan pengendali OPT, proses pemanfaatan fasilitasi dan produk jadi dari fasilitasi bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP tahun 2024.

(7). Pengelolaan Secara Luas Lalat Buah (*Area Wide Management*) pada Salak

Kegiatan *Area Wide Management* (AWM) merupakan kegiatan pengelolaan lalat buah skala luas yang bertujuan untuk menurunkan populasi lalat buah. Beberapa hal yang dikerjakan dalam AWM, antara lain penetapan lokasi, pemetaan wilayah, pelatihan petani dan petugas, pemasangan metil eugenol *wooden block*, penyemprotan protein hidrolisat, pemasangan monitoring trap, sanitasi buah terserang dan rearing sampel buah. Kegiatan AWM tahun dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu: 1) Gapoktan Ngudi Luhur (Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah); 2) Kelompok Tani Sido Maju I, Sido Maju II dan Sido Maju III (Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah); dan 3) Kelompok Tani Sido Mukti, Sido Makmur dan Si Cantik (Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta).

Pada AWM, untuk melihat indikator bahwa pengendalian skala luas berjalan efektif, maka dilakukan monitoring lalat buah dengan melihat nilai



Fruit Fly Trap per Day (FTD). FTD merupakan jumlah lalat buah yang tertangkap per perangkap per hari dan diolah menjadi data yang menunjukkan Tingkat fluktuasi populasi lalat buah di suatu area. FTD (<1) pada AWM merujuk pada tingkat keberhasilan dalam menekan populasi lalat buah di suatu area. Target FTD adalah <1 menunjukkan bahwa populasi lalat buah di lapangan sangat rendah, sehingga risiko serangan terhadap buah salak diminimalkan. Hasil FTD dari 3 (tiga) lokasi tersebut rata-rata <1, dibandingkan dengan transek/kontrol.

Pelaksanaan AWM 2024 dengan pagu total Rp182.600.000 terealisasi Rp182.599.390 (100%) dan realisasi fisik terealisasi 1 (satu) kegiatan (100%).



Gambar 13. Kegiatan AWM lalat buah di Kabupaten Magelang, Banjarnegara dan Sleman.

(8). Kajian Non Host Status Lalat Buah pada Manggis

Direktorat Perlindungan Hortikultura melakukan kajian bersama Universitas Gajah Mada (UGM), Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan BBPOPT Jatisari pada bulan Maret hingga November 2024. Kajian ini untuk mempercepat akselerasi pasar ekspor manggis Indonesia ke Taiwan serta memastikan bahwa buah manggis (*Garcinia mangostana*) bukan inang alami lalat buah. Hasil kajian tersebut penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam akses pasar ekspor buah manggis. Dengan demikian, buah manggis diharapkan semakin kompetitif di pasar internasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ditemukan bekas oviposisi, larva, pupa, atau imago baru pada buah manggis setelah masa inkubasi. Sebaliknya, buah belimbing menunjukkan aktivitas oviposisi dan perkembangan larva secara normal, membuktikan viabilitas lalat buah. Ketebalan dan kekerasan kulit manggis serta kandungan senyawa seperti



xanton dan tanin yang bersifat repelan menjadi penyebab utama resistensi buah manggis terhadap infestasi.

Pelaksanaan Kajian Non Host Status Lalat Buah pada Manggis dengan anggaran senilai Rp109.175.000, terealisasi senilai Rp109.174.457 (100%), dan realisasi fisik terealisasi 1 (satu) kegiatan (100%).



Gambar 14. Kegiatan koordinasi non host status lalat buah tahun 2024.

c. Area Penanganan DPI Hortikultura (1773.RAI.013)

Area penanganan DPI hortikultura merupakan salah satu kegiatan utama Direktorat Perlindungan Hortikultura yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan resiko kehilangan hasil akibat kekeringan pada pertanaman hortikultura. Dalam rangka mengantisipasi penurunan ketersediaan produk hortikultura akibat DPI, diperlukan upaya inventarisasi, identifikasi wilayah rawan kekeringan, serta langkah antisipasi maupun adaptasinya. Kegiatan Area Penanganan DPI Hortikultura pada tahun 2024 dilaksanakan melalui komponen kegiatan inventarisasi data/persiapan, fasilitasi bantuan sarana prasarana penanganan DPI, pendampingan dan pengawalan.

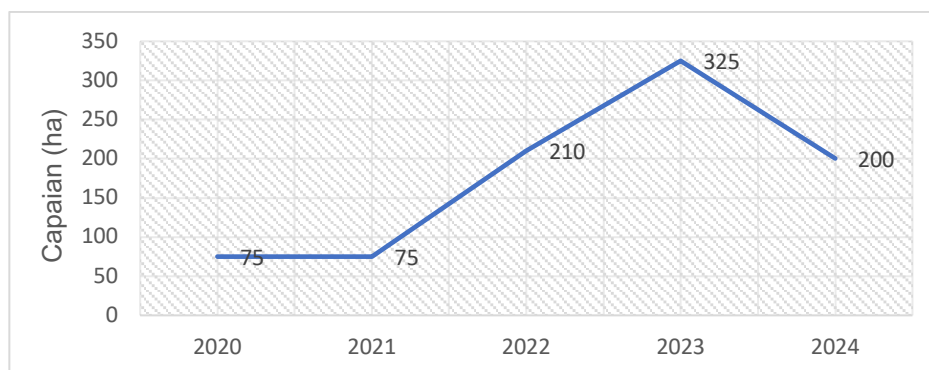
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Area Penanganan DPI Hortikultura Tahun 2024 adalah senilai Rp5.000.000.000 (pagu awal), namun terjadi blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp49.297.000 sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah senilai Rp4.950.703.000. Capaian realisasi keuangan untuk pelaksanaan Area Penanganan DPI Hortikultura pada tahun 2024 adalah senilai Rp4.950.544.355, yaitu sebesar 99,01% dari pagu awal senilai



Rp5.000.000.000. Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp49.297.000, maka realisasi keuangan menjadi sebesar 100%.

Capaian realisasi fisik untuk Area Penanganan DPI Hortikultura pada tahun 2024 adalah seluas 200 ha (100%) dari target area penangan DPI seluas 200 ha. Capaian realisasi fisik tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena target area penanganan DPI hortikultura pada tahun 2023 lebih tinggi yaitu seluas 325 ha jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu seluas 200 ha.

Terjadinya pengurangan luasan area penanganan DPI pada tahun 2024 tersebut disebabkan karena pada tahun 2023 terjadi fenomena El Nino yang ekstrim melanda hampir sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga banyak daerah yang membutuhkan bantuan fasilitasi dampak perubahan iklim seperti sumur, pompa dan sarana DPI lainnya. Memasuki tahun 2024, fenomena El Nino masih terjadi, namun tidak separah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, target bantuan DPI tahun 2024 tidak sebanyak target di tahun 2023. Mengingat tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari Implementasi Rencana Strategis periode 2020-2024, berikut grafik capaian pelaksanaan kegiatan Area Pengendalian OPT Hortikultura pada tahun 2020-2024:



Gambar 15. Capaian kegiatan Area Penanganan DPI Hortikultura pada tahun 2020-2024

1) Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPI

Fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPI pada tahun 2024 bertujuan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim khususnya kurangnya tingkat ketersediaan air bagi tanaman hortikultura. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPI diberikan dalam bentuk sarana penanganan DPI berupa pompa, pipanisasi, sumur dangkal serta fasilitasi DPI lainnya untuk mengatasi kekurangan air pada lahan hortikultura seluas 200 ha. Alokasi fasilitasi tersebut diberikan kepada 48 kelompok tani/gapoktan yang tersebar di 23 Kabupaten, pada 7 (tujuh) Provinsi.



Tabel 18. Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan DPI Tahun 2024

No.	Provinsi / Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Target (ha)	Realisasi Fisik		Kategori
			Rp	%		ha	%	
1	Sumatera Barat	3.501.952.000	422.182.000	100	24	24	100	Berhasil
2	Jawa Barat		1.015.250.400	100	58	58	100	Berhasil
3	Jawa Tengah		1.134.350.000	100	65	65	100	Berhasil
4	DI Yogyakarta		210.220.000	100	12	12	100	Berhasil
5	Jawa Timur		404.694.000	100	23	23	100	Berhasil
6	Nusa Tenggara Barat		104.200.000	100	6	6	100	Berhasil
7	Sulawesi Selatan		211.055.000	100	12	12	100	Berhasil
Total		3.501.952.000	3.501.951.400	100	200	200	100	

Tabel 19. Rincian Target dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas DPI Tahun 2024

No.	Provinsi	Kabupaten	Volume (ha)		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Jawa Barat	1. Cianjur	6	6	Berhasil
		2. Majalengka	6	6	Berhasil
		3. Cirebon	6	6	Berhasil
		4. Sumedang	11	11	Berhasil
		5. Garut	17	17	Berhasil
		6. Bandung	12	12	Berhasil
2.	Jawa Tengah	7. Magelang	12	12	Berhasil
		8. Bajarnegara	6	6	Berhasil
		9. Demak	6	6	Berhasil
		10. Grobogan	6	6	Berhasil
		11. Pati	6	6	Berhasil
		12. Brebes	17	17	Berhasil
		13. Kebumen	6	6	Berhasil
		14. Kendal	6	6	Berhasil
3.	DI. Yogyakarta	15. Kulon Progo	6	6	Berhasil
		16. Sleman	6	6	Berhasil
4.	Jawa Timur	17. Malang	6	6	Berhasil
		18. Nganjuk	11	11	Berhasil
		19. Probolinggo	6	6	Berhasil
5.	Sulawesi Selatan	20. Enrekang	12	12	Berhasil
6.	Sumatera Barat	21. Solok	18	18	Berhasil
		22. Agam	6	6	Berhasil
7.	Nusa Tenggara Barat	23. Lombok Timur	6	6	Berhasil
Total			200	200	



Capaian realisasi keuangan kegiatan Fasilitasi DPI pada tahun 2024 senilai Rp3.501.951.400 (100%) dari pagu anggaran senilai Rp3.501.952.000 sedangkan realisasi fisik kegiatan fasilitasi tersebut adalah seluas 200 haa (100%) dari target 200 ha, sehingga kategori capaian kinerja 'berhasil'.



Gambar 16. Kegiatan fasilitasi DPI pada tahun 2024

2) Kegiatan Pendukung Area Penanganan DPI Hortikultura

a) Inventarisasi Data/Persiapan

Kegiatan inventarisasi data/persiapan merupakan pendukung kegiatan penanganan DPI pada tahun 2024 yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi sebagai langkah awal inventarisasi data/persiapan serta pendampingan dan pengawalan selama proses berlangsungnya hingga selesainya fasilitasi penanganan DPI. Alokasi anggaran kegiatan inventarisasi data/persiapan tahun 2024 adalah senilai Rp193.993.000. Realisasi keuangan inventarisasi data/persiapan adalah senilai Rp193.992.120 (100%) dari pagu anggaran senilai Rp193.993.000.

Kegiatan inventarisasi data/persiapan tahun 2024 dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok dan Agam), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cianjur, Majalengka, Cirebon, Sumedang, Garut, dan Bandung), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Demak, Grobogan, Pati, Brebes, Temanggung, Kebumen dan Kendal), Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Malang, Nganjuk dan Probolinggo), Provinsi D.I. Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo dan



Sleman), Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur).

b) Fasilitas Mitigasi DPI dan Pengendali OPT

Fasilitas Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT tahun 2024 merupakan upaya mitigasi dampak perubahan iklim dalam menjaga ketersediaan komoditas hortikultura dari risiko kehilangan hasil akibat dampak perubahan iklim. Fasilitas Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT diberikan dalam bentuk agens hayati *Trichoderma* dan PGPR untuk area seluas 320 ha. Alokasi fasilitas tersebut untuk 48 kelompok tani/gapoktan yang tersebar di 23 Kabupaten pada 7 (tujuh) provinsi, rincian dalam Tabel 19.

Tabel 20. Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Fasilitas Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT Tahun 2024

No.	Provinsi / Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Target (ha)	Realisasi Fisik		Kategori
			Rp	%		ha	%	
1	Sumatera Barat	470.969.000	59.900.000	100	40	40	100	Berhasil
2	Jawa Barat		141.802.000	100	95	95	100	Berhasil
3	Jawa Tengah		146.283.300	100	98	98	100	Berhasil
4	DI Yogyakarta		34.484.000	100	23	23	100	Berhasil
5	Jawa Timur		36.000.000	100	24	24	100	Berhasil
6	Nusa Tenggara Barat		15.000.000	100	15	15	100	Berhasil
7	Sulawesi Selatan		37.499.500	100	25	25	100	Berhasil
Total		470.969.000	470.968.800	100	320	320	100	

Tabel 21. Rincian Target dan Realisasi Fisik Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT Tahun 2024

No.	Provinsi	Kabupaten	Volume (ha)		Kategori
			Target	Realisasi	
1	Sumatera Barat	1 Solok	32	32	Berhasil
		2 Agam	8	8	Berhasil
2	Jawa Barat	3 Cianjur	6	6	Berhasil
		4 Majalengka	15	15	Berhasil
		5 Cirebon	12	12	Berhasil
		6 Sumedang	15	15	Berhasil
		7 Garut	16	16	Berhasil
		8 Bandung	31	31	Berhasil
3	Jawa Tengah	9 Magelang	12	12	Berhasil



No.	Provinsi	Kabupaten	Volume (ha)		Kategori	
			Target	Realisasi		
		10	Bajarnegara	16	16	Berhasil
		11	Demak	12	12	Berhasil
		12	Grobogan	20	20	Berhasil
		13	Pati	12	12	Berhasil
		14	Brebes	14	14	Berhasil
		15	Kebumen	6	6	Berhasil
		16	Kendal	6	6	Berhasil
4	DI. Yogyakarta	17	Kulon Progo	13	13	Berhasil
		18	Sleman	10	10	Berhasil
5	Jawa Timur	19	Malang	8	8	Berhasil
		20	Nganjuk	8	8	Berhasil
		21	Probolinggo	8	8	Berhasil
6	Nusa Tenggara Barat	22	Lombok Timur	15	15	Berhasil
7	Sulawesi Selatan	23	Enrekang	25	25	Berhasil
Total				320	320	

Capaian realisasi keuangan kegiatan Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT tahun 2024 senilai Rp470.968.800 (100%) dari pagu anggaran senilai Rp470.968.800, sedangkan realisasi fisik kegiatan fasilitasi tersebut seluas 320 ha (100%) dari target seluas 200 ha dengan kategori capaian kinerja 'berhasil'.



Gambar 17. Fasilitasi mitigasi DPI dan pengendali OPT tahun 2024

c) Pendampingan dan Pengawasan

Capaian realisasi keuangan kegiatan pendampingan dan pengawasan senilai Rp.783.482.035 (99,96%) dari pagu anggaran senilai Rp.783.789.000. kegiatan ini dilaksanakan di Jawa Barat (Cianjur,



Majalengka, Cirebon, Sumedang, Garut, Bandung, Subang), Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Demak, Grobogan, Pati, Brebes, Kebumen, Kendal, Temanggung), Jawa Timur (Kabupaten Malang, Nganjuk, Probolinggo), DI Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo, Sleman), Sulawesi Selatan (Kabupaten Enrekang), Sumatera Barat (Kabupaten Solok dan Agam), Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur), Lampung (Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Lampung Timur), Bali (Kabupaten Tabanan).

d. Sarana Perlindungan Hortikultura (1773.RAI.014)

Kegiatan Sarana Perlindungan Hortikultura tahun 2024 dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pengembangan klinik PHT dan kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun kegiatan pendukung sarana perlindungan hortikultura antara lain kegiatan Akreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk LPHP, Pemasarakatan Perlindungan Hortikultura, Pembuatan Gapura Kampung Perlindungan Hortikultura dan Fasilitasi Pengendali OPT Ramah Lingkungan pada Kampung Perlindungan Hortikultura. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sarana Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 adalah senilai Rp4.000.000.000, namun terjadi blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp34.000.000 sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah senilai Rp3.966.000.000 (99,15%).

Capaian realisasi keuangan untuk pelaksanaan Sarana Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 adalah senilai Rp3.960.949.125, yaitu sebesar 99,02% dari pagu awal. Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas, maka capaian realisasi keuangan menjadi sebesar 99,87%. Capaian realisasi fisik untuk Sarana Perlindungan Hortikultura adalah sebanyak 50 unit (100%) dari target 50 unit.

1) Fasilitasi Pengembangan Klinik PHT

Fasilitasi Pengembangan Klinik PHT Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan peran dan manfaat klinik PHT sebagai lembaga layanan kesehatan tanaman hortikultura dari dan oleh petani, untuk mendukung peningkatan ketersediaan produk hortikultura bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing. Fasilitasi diberikan dalam bentuk peralatan/sarana pengembangan klinik PHT berupa mesin pencacah kompos, enkas, knapsack sprayer, mikroskop digital, dan rak etalase.

Penerima manfaat fasilitasi pengembangan klinik PHT tahun 2024 adalah Kelompok Tani/Gapoktan yang sudah menerima fasilitasi penumbuhan klinik



PHT pada tahun sebelumnya, aktif dan memiliki komitmen untuk membangun klinik PHT yang berkelanjutan. Alokasi fasilitasi diberikan kepada 50 Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani yang tersebar di 21 provinsi, 45 kabupaten/kota, sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 22. Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Klinik PHT Tahun 2024

No.	Provinsi / Satker	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Target (Unit)	Realisasi		Kategori
			Rp	%		Unit	%	
1	Aceh	20.000.000	20.000.000	100	1	1	100	Berhasil
2	Sumatera Utara	60.000.000	60.000.000	100	3	3	100	Berhasil
3	Sumatera Barat	60.000.000	60.000.000	100	3	3	100	Berhasil
4	Riau	40.000.000	40.000.000	100	2	2	100	Berhasil
5	Sumatera Selatan	60.000.000	60.000.000	100	3	3	100	Berhasil
6	Jambi	40.000.000	40.000.000	100	2	2	100	Berhasil
7	Bengkulu	60.000.000	60.000.000	100	3	3	100	Berhasil
8	Lampung	60.000.000	60.000.000	100	3	3	100	Berhasil
9	Jawa Barat	40.000.000	40.000.000	100	2	2	100	Berhasil
10	Jawa Tengah	80.000.000	80.000.000	100	4	4	100	Berhasil
11	D.I. Yogyakarta	60.000.000	60.000.000	100	3	3	100	Berhasil
12	Jawa Timur	40.000.000	40.000.000	100	2	2	100	Berhasil
13	Bali	20.000.000	20.000.000	100	1	1	100	Berhasil
14	Nusa Tenggara Barat	80.000.000	80.000.000	100	4	4	100	Berhasil
15	Kalimantan Barat	40.000.000	40.000.000	100	2	2	100	Berhasil
16	Kalimantan Tengah	40.000.000	40.000.000	100	2	2	100	Berhasil
17	Kalimantan Selatan	40.000.000	40.000.000	100	2	2	100	Berhasil
18	Sulawesi Utara	20.000.000	20.000.000	100	1	1	100	Berhasil
19	Sulawesi Tengah	40.000.000	40.000.000	100	2	2	100	Berhasil
20	Sulawesi Tenggara	60.000.000	60.000.000	100	3	3	100	Berhasil
21	Sulawesi Selatan	40.000.000	40.000.000	100	2	2	100	Berhasil
Total		1.000.000.000	1.000.000.000	100	50	50	100	

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian realisasi keuangan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Klinik PHT pada tahun 2024 senilai Rp1.000.000.000 (100%) dari pagu anggaran senilai Rp1.000.000.000 sedangkan realisasi fisik kegiatan fasilitasi tersebut adalah 50 unit klinik PHT (100%) dari target 50 unit.

Tabel 23. Rincian dan Target dan Realisasi Fisik Fasilitasi Pengembangan Klinik PHT Tahun 2024

No.	Provinsi	Kabupaten		Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani	Volume (Unit)		Kategori
					Target	Realisasi	
1.	Aceh	1.	Aceh Tengah	Rimbun	1	1	Berhasil



No.	Provinsi	Kabupaten		Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani	Volume (Unit)		Kategori		
					Target	Realisasi			
2.	Sumatera Utara	2.	Dairi	KWT Sehati	1	1	Berhasil		
		3.	Deli Serdang	Ramal	1	1	Berhasil		
		4.	Simalungun	Sabar Tani	1	1	Berhasil		
3.	Sumatera Barat	5.	Agam	Jawi-Jawi Agro	1	1	Berhasil		
				Ikhlas	1	1	Berhasil		
		6.	Solok	Subarang Aie Sepakat	1	1	Berhasil		
4.	Riau	7.	Kota Dumai	Sidomulyo	1	1	Berhasil		
		8.	Siak	Sumber Rezeki	1	1	Berhasil		
5.	Sumatera Selatan	9.	Palembang	Mariroso	1	1	Berhasil		
		10.	Ogan Ilir	Mitra Tani	1	1	Berhasil		
		11.	Ogan Komering Ulu	Tani Jaya	1	1	Berhasil		
6.	Jambi	12.	Kerinci	Konco Tani	1	1	Berhasil		
		13.	Tanjung Jabung Timur	Suka Maju	1	1	Berhasil		
7.	Bengkulu	14.	Rejang Lebong	Al Futuwah	1	1	Berhasil		
				Seluma	Barokah	1	1	Berhasil	
					Margo Suko	1	1	Berhasil	
8.	Lampung	16.	Tanggamus	Bina Karya	1	1	Berhasil		
		17.	Lampung Timur	Karya Tani	1	1	Berhasil		
		18.	Lampung Tengah	Mulya Tani	1	1	Berhasil		
9.	Jawa Barat	19.	Majalengka	Asosiasi Petani Mangga Kertajati (APMK)	1	1	Berhasil		
				Sumedang	Sri Mukti	1	1	Berhasil	
10.	Jawa Tengah	21.	Purworejo	Gadingrejo	1	1	Berhasil		
		22.	Wonosobo	Giri Tani	1	1	Berhasil		
		23.	Banjarnegara	Ngudi Slamet	1	1	Berhasil		
		24.	Brebes	Sedekah	1	1	Berhasil		
11.	DIY	25.	Kulonprogo	Ngudi Rejo	1	1	Berhasil		
				Bantul	Ngesti Rejeki	1	1	Berhasil	
					Sido Mulyo	1	1	Berhasil	
12.	Jawa Timur	27.	Banyuwangi	Tani Joyo	1	1	Berhasil		
				28.	Trenggalek	Sumber Rejeki	1	1	Berhasil
13.	Bali	29.	Tabanan	Batu Lumbang	1	1	Berhasil		
14.	Nusa Tenggara Barat	30.	Lombok Timur	Mekar V	1	1	Berhasil		
				31.	Lombok Tengah	Parek	1	1	Berhasil
				32.	Lombok Utara	Beriuq Sadar I	1	1	Berhasil
						Tunas Makbul	1	1	Berhasil
15.	Kalimantan Barat	33.	Sambas	Serai Wangi II	1	1	Berhasil		
				Sinar Usaha	1	1	Berhasil		
16.	Kalimantan Tengah	34.	Kapuas	Basarang Lestari	1	1	Berhasil		
		35.	Palangka Raya	Harapan	1	1	Berhasil		
17.	Kalimantan Selatan	36.	Hulu Sungai Selatan	Gerbang Tani	1	1	Berhasil		
		37.	Tanah Laut	Mutiara	1	1	Berhasil		
18.	Sulawesi Utara	38.	Tomohon	Alfa Omega	1	1	Berhasil		
19.	Sulawesi Tengah	39.	Tojo Una-una	Kajura'a	1	1	Berhasil		
		40.	Sigi	Singgani	1	1	Berhasil		



No.	Provinsi	Kabupaten		Kelompok Tani/ Kelompok Wanita Tani	Volume (Unit)		Kategori
					Target	Realisasi	
20.	Sulawesi Tenggara	41.	Kolaka Timur	Samaturu II	1	1	Berhasil
		42.	Buton	Sinar Tani	1	1	Berhasil
		43.	Muna Barat	Reformasi	1	1	Berhasil
21.	Sulawesi Selatan	44.	Pangkep	Alam Perkasa	1	1	Berhasil
		45.	Enrekang	STA Sumilan	1	1	Berhasil
Total					50	50	



Gambar 18. Serah terima fasilitas pengembangan klinik PHT tahun 2024

2) Kegiatan Pendukung Sarana Perlindungan Hortikultura

a. Fasilitas Akreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk LPHP

Standar akreditasi ISO/IEC 17025:2017 merupakan standar akreditasi internasional yang digunakan untuk mengukur kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu laboratorium di bidang pertanian, termasuk dalam mendukung peningkatan kinerja dan fungsi LPHP sebagai laboratorium pengujian agens pengendali hayati.

Manfaat penerapan ISO/IEC 17025:2017 diantaranya: 1) meningkatkan keandalan hasil pengujian; 2) memastikan validitas hasil pengujian; 3) memastikan laboratorium mengikuti praktik terbaik dalam manajemen mutu; serta 4) memastikan laboratorium mengikuti prosedur teknis yang tepat.

Direktorat Perlindungan Perlindungan Hortikultura pada Tahun 2024 memfasilitasi 2 LPHP untuk persiapan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 yaitu



LPHP Wilayah Kedu dan Satpel BTPH Wilayah I Cianjur. Progres kegiatan fasilitasi akreditasi sebagaimana dalam Tabel 23.

Tabel 24. Fasilitas Akreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk LPHP Tahun 2024

No	Intansi Induk	LPHP yang Diakreditasi	Progres s.d 31 Desember 2024
1	UPTD BTPHP Jawa Tengah	LPHP Wilayah Kedu	Sertifikat ISO 17025:2017
2	UPTD BTPH Jawa Barat	Satpel BTPH Wilayah I Cianjur	Persiapan pendaftaran akreditasi ke Komite Akreditasi Nasional



Gambar 19. Dokumen Sertifikasi Akreditasi ISO17025 untuk LPHP Wilayah Kedu Provinsi Jawa Tengah dari KAN.



Gambar 20. Pendampingan Persiapan Akreditasi LPHP Wilayah Kedu.



Fasilitasi akreditasi ISO/IEC 17025:2017 di Satpel BPTPH Wilayah I Cianjur dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengawalan dan bimbingan, dengan materi sebagai berikut:

- Pemahaman ISO/IEC 17025:2017
In House Training Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman dan Interpretasi SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Laboratorium pada Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah 1 Cianjur
- Validasi Metode Pengujian
In House Training Seleksi, Verifikasi dan Validasi Metode Pengujian Laboratorium pada Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah 1 Cianjur
- Penyusunan Dokumen ISO/IEC 17025:2017
In House Training Penyusunan Dokumen SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai Informasi Terdokumentasi pada Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah 1 Cianjur
- Estimasi Ketidakpastian Pengujian
In House Training Evaluasi Estimasi Ketidakpastian Pengukuran pada Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah 1 Cianjur
- Jaminan Mutu Pengujian
In House Training Jaminan Mutu Pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah 1 Cianjur
- Internal dan Kaji Ulang Manajemen
In House Training Audit Internal dan Kaji Ulang Manajemen sesuai SNI ISO 9001:2015 & SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Satuan Pelayanan BPTPH Wilayah 1 Cianjur.





Gambar 21. Pendampingan akreditasi 17025 Satpel wilayah I (LPHP) Cianjur

b. Pemasaratakan Perlindungan Hortikultura

Pemasaratakan Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 merupakan kegiatan untuk meningkatkan kepedulian publik (*public awareness*) terhadap perlindungan hortikultura. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengendalian OPT ramah lingkungan. Pemasaratakan perlindungan hortikultura tahun 2024 terealisasi senilai Rp499.750.000 (100%), dari pagu anggaran senilai Rp499.750.000. Alokasi pemasaratakan perlindungan hortikultura sebagai berikut:

Tabel 25. Alokasi Pemasaratakan Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

Nama Penyedia	Nilai (Rp)	Jenis Barang	Volume (Pcs)
PT Kharisma Putra kencana	124.950.000	Sayuran dan Goodie Bag	350
CV Raybri Indo	124.925.000	Tas Pinggang dan Bag Tag	475
CV Mutiara Gemilang	124.875.000	Kaos dan Gantungan Kunci	750
PT Wina Sarana Utama	125.000.000	Rompi	500
Total	499.750.000		





Gambar 22. Pemasyarakatan perlindungan hortikultura tahun 2024

c. Pembuatan Gapura Kampung Perlindungan Hortikultura

Penggunaan pengendali OPT ramah lingkungan antara lain relatif lebih aman bagi manusia dan agroekosistem daripada pestisida kimia sintetik, produk yang dihasilkan aman konsumsi, serta kompatibel dengan strategi pengendalian lain dalam PHT. Dalam rangka mensosialisasikan penerapan pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan, lokasi penerapan tersebut perlu ditandai dengan Gapura Kampung Perlindungan Hortikultura. Pembuatan gapura di kampung perlindungan hortikultura dialokasikan untuk 5 (lima) kabupaten sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 26. Capaian Keuangan dan Fisik Pembuatan Gapura Kampung Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

No.	Kabupaten	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Target (Paket)	Realisasi		Kategori
			Rp	%		Paket	%	
1	Garut	74.694.000	74.694.000	100,00	1	1	100	Berhasil
2	Solok	74.833.500	74.833.500	100,00	1	1	100	Berhasil
3	Brebes	74.800.000	74.800.000	100,00	1	1	100	Berhasil
4	Banjarnegara	74.886.150	74.886.150	100,00	1	1	100	Berhasil
5	Sleman	74.753.000	74.753.000	100,00	1	1	100	Berhasil
Total		373.966.650	373.966.650	100,00	5	5	100	

Realisasi keuangan pembuatan gapura kampung perlindungan hortikultura pada tahun 2024 dari pagu anggaran senilai Rp373.966.650, terealisasi senilai Rp373.966.650 (100%). Sedangkan realisasi fisik dari target sebanyak 5 (lima) paket, terealisasi sebanyak 5 (lima) paket (100%), sehingga kategori capaian kinerja 'berhasil'.





Gambar 23. Gapura kampung perlindungan hortikultura tahun 2024

d. **Fasilitas Pengendali OPT Ramah Lingkungan pada Kampung Perlindungan Hortikultura**

Fasilitas pengendali OPT ramah lingkungan di kampung perlindungan hortikultura pada tahun 2024 merupakan bentuk dukungan Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap upaya pemasyarakatan pertanian ramah lingkungan. Selain itu, fasilitas pengendali OPT ramah lingkungan di kampung perlindungan hortikultura juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan petani/pelaku usaha terhadap penggunaan pestisida kimia. Fasilitas pengendali OPT ramah lingkungan di kampung perlindungan hortikultura dialokasikan pada 5 (lima) kabupaten sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 27. **Capaian Keuangan dan Fisik Kegiatan Fasilitas Pengendali OPT Ramah Lingkungan pada Kampung Perlindungan Hortikultura TA 2024**

No.	Kabupaten	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Target (Paket)	Realisasi		Kategori
			Rp	%		Paket	%	
1	Garut	49.994.400	49.994.400	100,00	1	1	100	Berhasil
2	Solok	49.410.170	49.410.170	100,00	1	1	100	Berhasil
3	Brebes	49.901.630	44.899.700	89,98	1	1	100	Berhasil
4	Banjarnegara	49.995.000	49.995.000	100,00	1	1	100	Berhasil
5	Sleman	49.998.800	49.998.800	100,00	1	1	100	Berhasil
Total		249.300.000	244.298.070	97,99	5	5	100	



Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian realisasi keuangan kegiatan Fasilitasi Pengendali OPT Ramah Lingkungan pada Kampung Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 dengan pagu anggaran senilai Rp249.300.000, terealisasi senilai Rp244.298.070 (97,99%). Sedangkan realisasi fisik kegiatan fasilitasi tersebut dari target 5 (lima) paket, terealisasi sebanyak 5 (lima) paket (100%).



Gambar 24. Fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan di kampung perlindungan hortikultura dari atas ke bawah (Kabupaten Sleman, Banjarnegara, Brebes, Garutd Solok).

3.4 Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kinerja yang dicapai dari penganggaran yang telah dialokasikan melalui pelaksanaan kinerja utama.

3.4.1. Capaian Realisasi Keuangan Per Kegiatan

Pencapaian kinerja keuangan Direktorat Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024 dilakukan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. Berdasarkan klasifikasi rincian output (KRO), pada tahun 2024 Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai 4 (empat) rincian output yaitu:

KRO. Koordinasi

1. Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan Perlindungan Hortikultura



KRO Sarana Pengembangan Kawasan

2. Area Pengendalian OPT Hortikultura
3. Area Penanganan DPI Hortikultura
4. Sarana Perlindungan Hortikultura



Gambar 25. Komposisi Anggaran Direktorat Perlindungan Hortikultura per KRO Tahun 2024

Komposisi Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 sesuai dengan rincian KRO terdiri: 1) 40% anggaran untuk area pengendalian OPT hortikultura; 2) 24% anggaran untuk bimbingan teknis, sosialisasi, monev dan pelaporan; 3) 20% anggaran untuk area penanganan DPI; dan 4) 16% anggaran untuk sarana perlindungan hortikultura. Dukungan anggaran yang diperoleh Direktorat Perlindungan Hortikultura untuk pelaksanaan KRO tersebut adalah pagu senilai Rp25.000.000.000. Namun seiring berjalannya waktu terjadi penghematan anggaran senilai Rp1.500.000.000, sehingga pagu yang dimanfaatkan untuk realisasi KRO tahun 2024 adalah senilai Rp23.500.000.000.

Tabel 28. Realisasi Keuangan dan Fisik berdasarkan Output dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) per 24 Januari 2025

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi*)		Capaian (%)	
		Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan	Fisik
1773. Perlindungan Hortikultura	1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	6.000.000.000	24	5.203.656.000	24	86,73	100,00
	1773.RAI.010 Area Pengendalian OPT Hortikultura	10.000.000.000	2.500	9.379.641.000	2.500	93,80	100,00
	1773.RAI.013 Area Penanganan DPI Hortikultura	5.000.000.000	200	4.950.703.000	200	99,01	100,00
	1773.RAI.014 Sarana Perlindungan Hortikultura	4.000.000.000	50	3.966.000.000	50	99,15	100,00



Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi*		Capaian (%)	
		Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan	Fisik
Total		25.000.000.000		23.487.624.045		93,95	100,00

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan Online Monitoring SPAN (OMSPAN) (<http://spanint.kemenkeu.go.id>.*.) per tanggal 24 Januari 2025

Laporan pemantauan keuangan online monitoring OMSPAN per tanggal 24 Januari 2025 menurut jenis kewenangan dan kegiatan, menunjukkan bahwa realisasi keuangan Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 adalah senilai Rp23.487.624.045 (93,95%) dari pagu anggaran senilai Rp25.000.000.000. Sedangkan realisasi fisik dari masing-masing pelaksanaan indikator kinerja adalah sebesar 100%. Capaian realisasi keuangan tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan capaian realisasi keuangan tahun 2023 (99,14%). Hal tersebut disebabkan karena adanya blokir penghematan perjalanan dinas pada tahun 2024 senilai Rp1.500.000.000, sehingga pagu riil pemanfaatan anggaran yang dapat digunakan selama tahun 2024 adalah senilai Rp23.500.000.000. Jika mempertimbangkan kejadian penghematan anggaran tersebut, maka realisasi keuangan dan fisik berdasarkan output dalam RKT tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 29. Realisasi Keuangan dan Fisik berdasarkan Output dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan Mempertimbangkan Blokir Penghematan Perjalanan Dinas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi (%)	
				Terhadap Pagu	Jika Mempertimbangkan Blokir
1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	6.000.000.000	5.201.580.446	796.344.000	86,69	99,96
1773.RAI.010 Area Pengendalian OPT Hortikultura	10.000.000.000	9.374.550.119	620.359.000	93,75	99,95
1773.RAI.013 Area Penanganan DPI Hortikultura	5.000.000.000	4.950.544.355	49.297.000	99,01	100,00
1773.RAI.014 Sarana Perlindungan Hortikultura	4.000.000.000	3.960.949.125	34.000.000	99,02	99,87
Total	25.000.000.000	23.487.624.045	1.500.000.000	93,95	99,95

Capaian realisasi keuangan Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 dengan mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas adalah sebesar 99,95%. Capaian keuangan tersebut lebih tinggi 6% jika dibandingkan



dengan capaian keuangan berdasarkan pagu (93,95%). Capaian realisasi tersebut berdasarkan dari akumulasi capaian realisasi masing-masing indikator kinerja berikut:

- Capaian realisasi keuangan untuk pelaksanaan indikator kinerja Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan tahun 2024 berdasarkan pagu adalah sebesar 86,69%. Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp796.344.000, maka capaian realisasi keuangan menjadi sebesar 99,96%. Capaian realisasi fisik Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan adalah sebesar 100%.
- Capaian realisasi keuangan untuk pelaksanaan indikator kinerja Area Pengendalian OPT Hortikultura berdasarkan pagu adalah 93,75%. Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp620.359.000, maka capaian realisasi keuangan menjadi sebesar 99,95%. Capaian realisasi fisik Area Pengendalian OPT Hortikultura sebesar 100%.
- Capaian realisasi keuangan untuk pelaksanaan indikator kinerja Area Penanganan DPI Hortikultura berdasarkan pagu adalah sebesar 99,01%. Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp49.297.000, maka capaian realisasi keuangan menjadi sebesar 100%. Capaian realisasi fisik Area Penanganan DPI Hortikultura sebesar 100%.
- Capaian realisasi keuangan untuk pelaksanaan indikator kinerja Sarana Perlindungan Hortikultura berdasarkan pagu adalah 99,02%. Namun jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas senilai Rp49.297.000, maka capaian realisasi keuangan menjadi sebesar 99,87%. Capaian realisasi fisik Sarana Perlindungan Hortikultura sebesar 100%.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dilaporkan ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura tahun 2024 yaitu: 1) terkendalinya serangan OPT terhadap luas serangan OPT hortikultura; 2) tertanganinya DPI pada tanaman hortikultura terhadap area hortikultura yang terkena DPI; 3) meningkatnya kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura. Pencapaian kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30. Pencapaian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura 2024



No.	Sasaran Kinerja	Kode	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Pengendalian serangan OPT terhadap luas tanam Hortikultura	1-1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura (%)	99,65	99,69
2.	Penanganan area yang terkena DPI terhadap area yang terkena DPI	2-1	Rasio luas area yang mendapatkan penanganan DPI terhadap luas area yang terkena DPI (%)	93,05	93,30
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	2-1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura (Skala Likert)	3,21	3,23

3.4.2. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi sumber daya Direktorat Perlindungan Hortikultura mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Lampiran Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran sesuai alokasi anggaran. Perlu disampaikan pula bahwa pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian output program atau capaian Rincian Output (RO) yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E_{OP} : Efisiensi Output Program

$AA \text{ Program}_i$: Alokasi Anggaran Program i

$RA \text{ Program}_i$: Realisasi Anggaran Program i

COP_i : Capaian Output Program i



n : jumlah program pada suatu unit Eselon II

a. Analisis Efisiensi Sumberdaya Tahun 2024

Hasil pengukuran terhadap efisiensi penggunaan anggaran dengan pencapaian target output dapat dikatakan efisien, dengan kinerja penggunaan anggaran kegiatan Direktorat Perlindungan Hortikultura sesuai pagu anggaran sebesar 93,96%, dan jika mempertimbangkan blokir penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar 99,69%. Persentase capaian kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 dalam hal efisiensi sesuai pagu anggaran dengan mempertimbangkan blokir penghematan anggaran perjalanan dinas adalah sebesar 50,13%. Efisiensi ini dihitung dan dilihat pada aplikasi SMART Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, namun demikian efisiensi ini tidak memiliki skala 0%-100%. Untuk itu perlu dilakukan penghitungan nilai efisiensi yang diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Untuk mendapatkan nilai efisiensi dalam skala 0-100% maka perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan rumus :

$$NE=50%+(E/20 \times 50) \quad \text{dimana NE} = \text{Nilai efisiensi}; E = \text{Efisiensi}$$

Tabel 31. Nilai Efisiensi pada Rincian Output Kegiatan Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

Kegiatan	Nama Rincian Output (RO)	Fisik			Keuangan		AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
		Target	Realisasi	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)		
1773. Perlindungan Hortikultura	1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	24	24	100,00	6.000.000.000	5.201.580.446	6.000.000.000	798.419.554
	1773.RAI.010 Area Pengendalian OPT Hortikultura	2.500	2.500	100,00	10.000.000.000	9.374.550.119	10.000.000.000	625.449.881
	1773.RAI.010 Area Penanganan Hortikultura	200	200	100,00	5.000.000.000	4.950.544.355	5.000.000.000	49.455.645
	1773.RAI.014 Sarana Perlindungan Hortikultura	50	50	100,00	4.000.000.000	3.960.949.125	4.000.000.000	39.050.875
JUMLAH					25.000.000.000	23.487.624.045	25.000.000.000	1.512.375.955
Efisiensi (%)					$\frac{\sum((AARO \times CRO) - RARO)}{\sum(AARO)}$		0,060	



Kegiatan	Nama Rincian Output (RO)	Fisik			Keuangan		AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
		Target	Realisasi	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)		
Nilai Efisiensi (%)					50% + E/20 X 50		65,12	

Nilai efisiensi Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 dengan dukungan pagu anggaran senilai Rp25.000.000.000 adalah sebesar 65,12%, dengan penghitungan sebagai berikut:

$$NE = 50\% + ((0,06\%)/20 \times 50) = 0,6512 \text{ atau } 65,12\%$$

Mengingat terjadinya blokir penghematan anggaran perjalanan dinas pada tahun 2024 senilai Rp1.500.000.000, maka dengan mempertimbangkan hal tersebut nilai efisiensinya adalah sebesar 50,13%, dengan penghitungan sebagai berikut:

$$NE = 50\% + ((0,001\%)/20 \times 50) = 0,5013 \text{ atau } 50,13\%$$

Tabel 32. Nilai Efisiensi pada Rincian Output Kegiatan Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 (Mempertimbangkan Blokir Penghematan Perjalanan Dinas)

Kegiatan	Nama Rincian Output (RO)	Fisik			Keuangan		AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
		Target	Realisasi	CRO (%)	Pagu (AARO)	Realisasi (RARO)		
1773. Perlindungan Hortikultura	1773.AEA.013 Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	24	24	100,00	5.203.656.000	5.201.580.446	5.203.656.000	2.075.554
	1773.RAI.010 Area Pengendalian OPT Hortikultura	2.500	2.500	100,00	9.379.641.000	9.374.550.119	9.379.641.000	5.090.881
	1773.RAI.010 Area Penanganan Hortikultura	200	200	100,00	4.950.703.000	4.950.544.355	4.950.703.000	158.645
	1773.RAI.014 Sarana Perlindungan Hortikultura	50	50	100,00	3.966.000.000	3.960.949.125	3.966.000.000	5.050.875
JUMLAH					23.500.000.000	23.487.624.045	23.500.000.000	12.375.955
Efisiensi (%)					$\frac{\sum((AARO \times CRO) - RARO)}{\sum(AARO)}$		0,001	
Nilai Efisiensi (%)					50% + E/20 X 50		50,13	

3.5. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Pencapaian target yang telah dihasilkan dari masing-masing sasaran output kegiatan perlindungan hortikultura sesuai dengan implementasi Renstra Direktorat



Perlindungan Hortikultura Tahun 2020-2024, telah memberikan dampak dan manfaat dalam mendukung pengamanan produksi hortikultura. Dukungan subsistem yang menjadi satu kesatuan pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan, merupakan sebagai upaya dalam menghantarkan pencapaian sasaran target. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan, hambatan dan tantangan, baik dari aspek teknis maupun aspek manajemen.

3.5.1. Permasalahan

- 1) Adanya keterlambatan dan perubahan SK CPCL penerima manfaat dan komoditas hortikultura yang diajukan oleh Dinas Pertanian Provinsi;
- 2) Adanya revisi anggaran karena blokir penghematan perjalanan dinas sebesar 50%;
- 3) Terlambatnya penyaluran saprodi di lokasi *champion* cabai dan bawang merah, dan pergeseran musim hujan sehingga jadwal penanaman mundur yang mengakibatkan pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT mengalami keterlambatan;
- 4) Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengembangan klinik PHT dan fasilitasi bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP;
- 5) Beberapa daerah membutuhkan tahapan proses uji geolistrik untuk mendapatkan sumber air tanah. Sedangkan uji tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar dan anggaran terbatas.

3.5.2. Tindak Lanjut

- 1) Koordinasi lebih intensif dengan Dinas Pertanian Provinsi untuk mempercepat proses penerbitan SK CPCL yang tepat waktu;
- 2) Mengidentifikasi lokasi-lokasi yang membutuhkan uji geolistrik lebih awal dan mempersiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut;
- 3) Usulan penambahan pagu anggaran kegiatan perlindungan hortikultura;
- 4) Melaksanakan pertemuan dan koordinasi secara intensif antara pusat (Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura), provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan strategis baik melalui *video conference*, pendampingan/pembinaan/pengawasan langsung ke daerah, dan konfirmasi melalui telepon maupun Whatsapp.

3.5.3. Rencana Aksi



Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura:

- 1) Melaksanakan gerakan pengendali OPT hortikultura ramah lingkungan dengan melibatkan petani/kelompok tani dan klinik PHT;
- 2) Memberikan fasilitasi sarana klinik PHT;
- 3) Memberikan pelatihan dan pemahaman konsep PPHT kepada petani;
- 4) Memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas petugas POPT;
- 5) Melaksanakan pendampingan/pengawasan/monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan hortikultura.

Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI :

- 1) Memberikan peringatan dini terkait data iklim menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin;
- 2) Memberikan sarana penanganan DPI;
- 3) Menerapkan teknologi mitigasi DPI;
- 4) Melakukan koordinasi intensif dengan UPTD BTPH seluruh Indonesia;
- 5) Memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas petugas POPT; dan
- 6) Melaksanakan pendampingan/pengawasan/monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan DPI.

Nilai PMPRB Direktorat Perlindungan Hortikultura

- 1) Menginstruksikan personil dalam Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Perlindungan Hortikultura melaksanakan tugas sesuai uraian tugas dalam SK dan membuat rencana aksi; dan
- 2) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.



BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktorat Perlindungan Hortikultura kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal yang merupakan gambaran atas pencapaian target kinerja sesuai dengan implementasi Renstra Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2020-2024. Capaian target dari masing-masing IKU tahun 2024 yaitu: 1) capaian kinerja rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura diperoleh kategori '**sangat berhasil**'; 2) capaian kinerja rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI diperoleh kategori '**sangat berhasil**'; dan 3) capaian kinerja pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura diperoleh kategori '**sangat puas**'.

Capaian kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran yang optimal dengan nilai capaian realisasi anggaran sesuai pagu sebesar **93,95%**, dan jika mempertimbangkan blokir penghematan perjalanan dinas sebesar **99,95%**. Capaian fisik seluruh kegiatan Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024 sebesar **100%**.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Hortikultura



Lampiran 2. Data Pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Jenis Kelamin	
	a. Pria	17
	b. Wanita	26
2.	Pendidikan	
	SD	
	b. SMP	1
	c. SMU	5
	d. Sarjana Muda	1
	e. S1	20
	f. S2	16
	g. S3	
3.	Golongan	
	a. I	
	b. II	2
	c. III	29
	d. IV	12
4.	Masa Kerja	
	a. < 11 tahun	16
	b. 11 - 20 tahun	9
	c. 21 - 30 tahun	18
	d. > 30 tahun	
5.	Jabatan	
	a. Fungsional POPT	27
	b. Fungsional Umum	16
6.	Status Kepegawaian	
	a. PNS	37
	b. PPPK	6



Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdithorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jekvy Hendra
Jabatan : Direktur Perlindungan Hortikultura
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua


Prihasto Setyanto

Pihak Pertama


Jekvy Hendra



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Pengendalian serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura	1-1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	99,65 %
2	Penanganan area yang terkena DPI terhadap area yang terkena DPI	2-1	Rasio Luas area hortikultura yang mendapat Penanganan DPI terhadap Luas area hortikultura yang terkena DPI	93,05 %
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	2-1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura	3,21 Skala Likert

KEGIATAN

1 Perlindungan Hortikultura

ANGGARAN

Rp. 25.000.000.000,00

Jakarta, Februari 2024

Pihak Kedua


Prihasto Setyanto

Pihak Pertama


Jekvy Hendra



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdi@horti@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sidiq
Jabatan : Direktur Perlindungan Hortikultura
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Taufiq Ratule
Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Hortikultura
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2024

Pihak Kedua

Muhammad Taufiq Ratule

Pihak Pertama

Muhammad Sidiq



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PERLINDUNGAN HORTIKULTURA**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Pengendalian serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura	1-1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura	99,65 %
2	Penanganan area yang terkena DPI terhadap area yang terkena DPI	2-1	Rasio Luas area hortikultura yang mendapat Penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	93,05 %
3	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura yang efektif, efisien dan akuntabel	3-1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura	3,21 Skala Likert

KEGIATAN
1773 Perlindungan Hortikultura

ANGGARAN
Rp. 25.000.000.000,00

Jakarta, Agustus 2024

Pihak Kedua

Muhammad Taufiq Ratule

Pihak Pertama

Muhammad Sidiq

Lampiran 4. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sd Tim Kerja 2024

2024

Website (1) SKP 2024 Substansi Departemen Hortikultura dan Perikanan

Periode SKP: 15.01.2024 s.d. 31.12.2024 **Siapkan** | SKP Seleksi: 15.01.2024 | **SKP Pasang / Penyelesaian**

I. PEJABAT PENJAJI

Nama: Y. M. HARMADI (M)PENGHIMPUN
 NP: 5004030000000
 Pangkat/Golongan/TMT: PENAKSI 1b (2016 / TMT 2023-03-31)
 Jabatan: KEPALA SUBSTANSI PERIKANAN DAN PERikanan
 Unit Kerja: DIREKTORAT PERIKANAN DAN PERikanan

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama: SRI HENDAYATI BEBEM
 NP: 5004030000000
 Pangkat/Golongan/TMT: PENAKSI 1b (2016 / TMT 2023-03-31)
 Jabatan: KEPALA SUBSTANSI PERIKANAN DAN PERikanan
 Unit Kerja: DIREKTORAT PERIKANAN DAN PERikanan

1/2024

Langkah 1: Menentukan Sasaran Kinerja

Langkah 2: Penyelesaian SKP

Langkah 3: Penyelesaian SKP

Langkah 4: Penyelesaian SKP

INDICATOR HASIL KERJA

No	Indikator	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja
1	Penyusunan	Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP)	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.
2	Penyusunan	Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP)	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.
3	Penyusunan	Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP)	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.

2024

Website (1) SKP 2024 Substansi Departemen Hortikultura dan Perikanan

Periode SKP: 15.01.2024 s.d. 31.12.2024 **Siapkan** | SKP Seleksi: 15.01.2024 | **SKP Pasang / Penyelesaian**

I. PEJABAT PENJAJI

Nama: SRI HENDAYATI BEBEM
 NP: 5004030000000
 Pangkat/Golongan/TMT: PENAKSI 1b (2016 / TMT 2023-03-31)
 Jabatan: KEPALA SUBSTANSI PERIKANAN DAN PERikanan
 Unit Kerja: DIREKTORAT PERIKANAN DAN PERikanan

II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI

Nama: SRI HENDAYATI BEBEM
 NP: 5004030000000
 Pangkat/Golongan/TMT: PENAKSI 1b (2016 / TMT 2023-03-31)
 Jabatan: KEPALA SUBSTANSI PERIKANAN DAN PERikanan
 Unit Kerja: DIREKTORAT PERIKANAN DAN PERikanan

1/2024

Langkah 1: Menentukan Sasaran Kinerja

Langkah 2: Penyelesaian SKP

Langkah 3: Penyelesaian SKP

INDICATOR HASIL KERJA

No	Indikator	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja	Uraian Sasaran Kinerja
1	Penyusunan	Penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP)	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.	Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) dan rencana kerja jangka panjang (RJKP) yang selaras dengan visi dan misi organisasi.

Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPl pada tanaman hortikultura	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura (%)	95,00	95,00	95,00	95,50	99,65	99,43	99,30	99,61	99,40	99,69	104,66	104,53	104,85	104,63	100,04
	Rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan DPl terhadap luas area yang terkena DPl (%)	50,00	50,00	50,00	50,50	93,05	50,00	80,99	74,65	92,82	93,30	152,82	161,92	149,30	185,64	100,27
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketelausahaan Direktorat yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura terhadap layanan ketelausahaan Direktorat Perlindungan Hortikultura (skala Likert)	-	-	-	3,15	3,21	-	-	-	3,27	3,23	-	-	-	103,81	100,62

Sumber: Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2024.

Lampiran 6. Realisasi Anggaran per Triwulan 2024

a. Realisasi Per Triwulan Berdasarkan Pagu Rp25.000.000.000

No.	Indikator Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi											
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%				
1	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	6.000.000.000	1.906.211.362	31,77	2.362.697.569	39,38	4.484.128.416	74,74	5.201.580.446	85,38				
2	Area Pengendalian OPT Hortikultura	10.000.000.000	216.633.700	2,17	450.665.535	4,51	2.989.711.287	29,90	9.374.550.119	79,14				
3	Area Penanganan DPl Hortikultura	5.000.000.000	188.907.994	3,78	427.698.396	8,55	2.411.270.561	48,23	4.950.544.355	98,31				
4	Sarana Perlindungan Hortikultura	4.000.000.000	168.766.271	4,22	481.752.103	12,04	1.815.957.435	45,40	3.960.949.125	95,80				
	Total	25.000.000.000	2.480.519.327	9,92	3.722.813.603	14,89	11.701.067.699	46,80	23.487.624.045	93,95				

b. Realisasi Per Triwulan Jika Mempertimbangkan Blokir Penghematan Perjalanan Dinas

No.	Pagu (Rp)	Blokir	Pagu Seseleh Blokir (Rp)	Realisasi											
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
				Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%				
1	Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan	6.000.000.000	796.344.000	5.203.656.000	1.906.211.362	31,77	2.362.697.569	39,38	4.484.128.416	74,74	5.201.580.446	85,38			
2	Area Pengendalian OPT Hortikultura	10.000.000.000	620.359.000	9.379.641.000	216.633.700	2,17	450.665.535	4,51	2.989.711.287	29,90	9.374.550.119	79,14			
3	Area Penanganan DPl Hortikultura	5.000.000.000	49.297.000	4.950.703.000	188.907.994	3,78	427.698.396	8,55	2.411.270.561	48,23	4.950.544.355	98,31			
4	Sarana Perlindungan Hortikultura	4.000.000.000	34.000.000	3.966.000.000	168.766.271	4,22	481.752.103	12,04	1.815.957.435	45,40	3.960.949.125	95,80			
	Total	25.000.000.000	1.500.000.000	23.500.000.000	2.480.519.327	10,56	3.722.813.603	15,84	11.701.067.699	49,79	23.487.624.045	99,95			

Lampiran 7. Rasio Serangan OPT Hortikultura Tahun 2020-2024

Komoditas	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 ¹⁾			Tahun 2024		
	Terkers (ha)	Puas (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkers (ha)	Puas (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkers (ha)	Puas (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkers (ha)	Puas (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkers (ha)	Puas (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Apukat	7,85	0,00	100,00	1476,51	0,00	100,00	98,73	-	100,00	45,00	0,00	100,00	146,84	-	100,00
Aneka Cabel	31754,28	74,14	99,77	25717,62	31,78	99,75	25675,04	100,96	99,80	20173,83	24,86	99,88	21038,50	2,07	99,99
Angrek	117,90	0,00	100,00	0,61	0,00	100,00	0,15	-	100,00	0,19	0,00	100,00	0,07	-	100,00
Bawang Merah	6003,95	4,70	99,94	7709,77	9,41	99,76	6283,96	1,72	99,87	6976,50	53,61	99,23	6356,37	1,90	99,97
Bawang Putih	489,80	0,00	100,00	245,83	0,00	100,00	196,00	-	100,00	151,20	0,00	100,00	83,78	-	100,00
Belimbing	15,23	0,00	100,00	2,70	0,00	100,00	282,78	-	100,00	30,32	0,00	100,00	29,01	-	100,00
Buah Naga	89,87	0,00	100,00	150,00	1,00	98,70	175,93	-	100,00	237,59	0,10	99,96	313,31	-	100,00
Durian	255,98	0,00	100,00	1173,23	0,00	100,00	499,89	-	100,00	568,59	0,00	100,00	454,61	-	100,00
Jagung Maris	102,23	0,00	100,00	150,63	0,00	100,00	771,96	-	100,00	1207,97	0,00	100,00	1443,91	-	100,00
Jane	135,56	0,27	99,80	251,44	0,00	100,00	225,41	-	100,00	183,09	2,08	98,91	318,18	-	100,00
Jambu Air	11,67	0,00	100,00	14,97	0,00	100,00	40,56	-	100,00	27,98	0,00	100,00	22,03	-	100,00
Jambu Biji/Kristal	22,27	0,00	100,00	111,66	0,00	100,00	217,37	-	100,00	87,44	0,06	99,83	217,75	1,80	98,17
Jeruk	10210,88	48,92	99,52	16857,61	440,12	94,91	9197,77	89,61	98,98	7249,57	149,75	97,93	13744,13	43,73	99,68
Kalengjeng	6,50	0,00	100,00	335,48	0,00	100,00	9,89	-	100,00	87,21	0,00	100,00	116,00	-	100,00
Kantang	2890,83	0,00	100,00	3059,09	2,00	99,87	3310,42	-	100,00	2120,08	0,00	100,00	1762,14	-	100,00
Krisan	9,75	0,00	100,00	446,32	0,00	100,00	12,34	-	100,00	23,56	0,00	100,00	15,87	-	100,00
Kubis	5625,58	0,00	100,00	4088,31	0,00	100,00	4420,31	0,40	99,99	2998,63	2,08	99,93	2476,11	-	100,00
Kumud	1,18	0,00	100,00	15,39	0,00	100,00	39,61	-	100,00	21,20	0,00	100,00	13,30	-	100,00

Komoditas	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 ¹⁾			Tahun 2024		
	Terkena (ha)	Puas (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puas (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puas (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puas (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)	Terkena (ha)	Puas (ha)	Rasio Serangan yang ditangani (%)
Mangga	5143,79	5,89	99,89	4020,49	0,02	100,00	4684,36	15,28	99,90	2816,83	20,81	99,20	3597,15	-	100,00
Manggis	202,58	0,00	100,00	1761,80	0,00	100,00	402,01	-	100,00	318,09	0,00	100,00	247,53	-	100,00
Mawar	54,00	0,00	100,00	125,16	0,00	100,00	16,01	-	100,00	39,15	0,00	100,00	15,48	-	100,00
Melati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,20	-	100,00
Melon	33,20	0,00	100,00	23,20	0,00	100,00	82,69	10,00	87,37	120,02	0,50	99,58	371,28	-	100,00
Nanas	366,15	0,00	100,00	2884,73	0,00	100,00	146,76	-	100,00	186,54	0,70	99,62	123,86	-	100,00
Pepaya	828,96	0,00	100,00	668,56	0,00	100,00	881,84	-	100,00	748,30	0,50	99,93	390,55	-	100,00
Pisang	12102,79	346,05	97,14	30180,61	0,00	100,00	13507,63	89,66	99,34	9842,97	88,74	99,00	10946,18	161,38	98,53
Rambutan	197,39	0,00	100,00	51,22	0,00	100,00	240,13	-	100,00	63,07	0,00	100,00	65,96	-	100,00
Salak	1775,54	0,00	100,00	4274,29	80,00	96,26	2544,68	-	100,00	1989,88	0,00	100,00	1210,68	-	100,00
Semangka	205,94	0,00	100,00	256,10	0,00	100,00	585,48	-	100,00	537,61	0,00	100,00	454,12	-	100,00
Terong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	100,00
Tomat	3987,19	0,00	100,00	3526,78	0,83	99,95	4093,66	0,20	99,99	-	-	-	3420,51	1,00	99,97
Grand Total	84458,03	479,97	99,43	109280,11	565,16	99,30	79642,96	307,63	99,61	69649,40	363,63	99,40	69405,52	211,86	99,69

Sumber: Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2024

Lampiran 8. Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI Tahun 2020-2024

No	Kategori	Komoditas	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Terkena (ha)	Puas (ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (ha)	Puas (ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (ha)	Puas (ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (ha)	Puas (ha)	Rasio DPI (%)	Terkena (ha)	Puas (ha)	Rasio DPI (%)
1	Banjir	Sayur	2.281,22	254,57	79,92	2.810,64	1.591,76	27,69	2.417	575,83	76,18	704,5	76,24	89,18	3.307,43	192,666	94,17
		Buah	295,85	74,10	59,94	13.254,43	1.383,25	80,98	598,59	192,1	67,96	64,49	4,64	92,81	577,05	227,57	60,6
		Tan. Obat	0	0	0,00	50	20	42,86	31	25	19,35	2	0	100	2	2	0
2	Kekeringan	Sayur	12,4	2	72,22	147,97	0	100	50,65	0	100	193,75	0,5	99,74	310,45	0,2	99,94
		Buah	18	18	0	1,35	0	100	30	0	100	183	1	99,45	0	0	0
Total			2.607,47	348,67	76,41	16.264,39	3.005,03	80,99	3.128,49	792,93	74,65	1.147,74	82,38	92,82	4.196,93	422,236	89,94

Sumber: Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2024

Lampiran 5. Rencana aksi Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Langkah - Langkah Pencapaian	Target	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan gerakan pengendali OPT hortikultura ramah lingkungan dengan melibatkan petani/kelompok tani dan klinik PHT; Memberikan fasilitasi sarana klinik PHT; Memberikan pelatihan dan pemahaman konsep PPHT kepada petani; Memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas petugas POPT; Melaksanakan pendampingan/pengawasan/monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan hortikultura. 	99,65%	-	-	-	99,65
2	Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan peringatan dini terkait data iklim menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin; Memberikan sarana penanganan DPI; Menerapkan teknologi mitigasi DPI; Melakukan koordinasi intensif dengan UPTD BPTPH seluruh Indonesia; 	93,05%	-	-	-	93,05

No.	Indikator Kinerja	Langkah - Langkah Pencapaian	Target	Target			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
		5. Memberikan pelatihan, peningkatan kapasitas petugas POPT; dan 6. Melaksanakan pendampingan/pengawasan/monitoring dan evaluasi kegiatan penanganan DPI.					
3	Nilai PMPRB Direktorat Perlindungan Hortikultura	1. Menginstruksikan personil dalam Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Perlindungan Hortikultura melaksanakan tugas sesuai uraian tugas dalam SK dan membuat rencana aksi; dan 2. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.	3,25	-	-	-	3,25

Lampiran 6. Matrik Upaya Pencapaian Kinerja Direktorat Perlindungan Hortikultura
Tahun 2024

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
1	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Perlindungan Hortikultura	
	<p>a. Terlambatnya penyaluran saprodi di lokasi <i>champion</i> cabai dan bawang merah, sehingga pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT mengalami keterlambatan;</p> <p>b. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengembangan klinik PHT dan fasilitasi bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP;</p> <p>c. Adanya pergeseran musim hujan sehingga jadwal penanaman mundur;</p> <p>d. Beberapa daerah membutuhkan tahapan proses uji geolistrik untuk mendapatkan sumber air tanah. Sedangkan uji tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar dan anggaran terbatas.</p> <p>e. Adanya revisi anggaran karena blokir penghematan perjalanan dinas sebesar 50%;</p>	<p>a. Koordinasi lebih intensif dengan Dinas Pertanian Provinsi untuk mempercepat proses penerbitan SK CPCL yang tepat waktu;</p> <p>b. Mengidentifikasi lokasi-lokasi yang membutuhkan uji geolistrik lebih awal dan mempersiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut;</p> <p>c. Usulan penambahan pagu anggaran kegiatan perlindungan hortikultura;</p> <p>d. Melaksanakan pertemuan dan koordinasi secara intensif antara pusat (Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura), provinsi dan kabupaten/ kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan strategis baik melalui <i>video conference</i>, pendampingan/pembinaan/pengawasan langsung ke daerah, dan konfirmasi melalui telepon maupun Whatsapp.</p>
2.	Nilai PMPRB Direktorat Perlindungan Hortikultura	
	<p>a. Pada area penataan tatalaksana butir proses bisnis dan prosedur operasional tetap belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP, bukti seluruh SOP telah diterapkan, serta bukti evaluasi peta proses bisnis SOP secara berkala</p> <p>b. Pada area penataan sistem manajemen SDM, Butir perencanaan kebutuhan pegawai belum dilengkapi dengan eviden yang memadai yaitu</p>	<p>a. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) SOP Makro dan Mikro dari Eselon II sesuai dengan Proses bisnis Kementan; 2) Hasil evaluasi SOP dan bukti verbal pelaksanaan SOP.</p> <p>b. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan dokumen anjab dan ABK Tahun 2024 sesuai perubahan Permentan Tahun 2020. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan SK Kode Etik serta bukti pemotongan tukin terhadap pegawai yang melanggar aturan disiplin waktu kerja (terlambat datang/pulang cepat)</p>

No	Permasalahan/Upaya yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut yang Dilakukan
	<p>bukti analisis seluruh jabatan dan beban kerja</p> <p>c. Pada area penguatan pengawasan, Butir gratifikasi belum dilengkapi dengan dengan eviden yang memadai, yaitu bukti public campaign secara berkala. Bukti monev SPI secara berkala, bukti sosialisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai Direktorat Perlindungan Hortikultura</p> <p>d. Pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Butir Pengelolaan pengaduan belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti SK Lapor di tingkat organisasi serta bukti tindak lanjut seluruh pengaduan pelayanan. Butir Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan belum dilengkapi dengan eviden yang memadai, yaitu bukti survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.</p>	<p>c. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan 1) standing banner dan spanduk tentang pelarangan gratifikasi; 2) laporan monev dan dokumentasi SPI.</p> <p>d. Telah ditindaklanjuti dengan melampirkan laporan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan dan konsultansi dengan melampirkan laporan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</p>

Lampiran 7. Data Pendukung Lain yang Relevan

- a. Form Survey Tingkat Pelayanan terhadap Pegawai lingkup Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

Survey TU Perlindungan Th 2024

Mohon untuk Bapak/Ibu untuk mengisi semua pertanyaan untuk menuju DITLIN menjadi lebih baik:)

Nama/Kelompok *

Your answer _____

Kebersihan lingkungan ruang kerja Subbagian Tata Usaha *

Sangat Puas

Puas

Tidak Puas

Sangat Tidak Puas

Kenyamanan ruang rapat dan kelengkapan fasilitas ruang rapat. (AC, kursi, meja, lampu, pc, infocus, mic, wifi, white board, dispenser, stop kontak) *

Sangat Puas

Puas

Tidak Puas

Sangat Tidak Puas

Kebersihan toilet *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Kelengkapan Toilet. (Kecukupan air, penerangan, wastafel, kaca, hand soap, pewangi ruangan, penghisap udara, keset, tempat sampah, tissue, kloset) *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Dekorasi tanaman hidup diluar dan didalam ruang kerja *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Kebersihan lingkungan ruang kerja Subbagian Tata Usaha *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Kemudahan mendapatkan/mengajukan layanan layanan persuratan, rumah tangga dan kearsipan di Subbagian Tata Usaha (surat menyurat, ATK, arsip dokumen dll) *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Kemudahan mendapatkan/mengajukan Barang Milik Negara di Subbagian Tata Usaha (penggantian inventaris kantor yang rusak/baru) *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Kemudahan mendapatkan/mengajukan layanan administrasi kepegawaian Subbagian Tata usaha (kenaikan pangkat, KGB, Cuti, Karis/Karsu, Pencantuman Gelar dll) *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Kemudahan mendapatkan/mengajukan layanan administrasi keuangan Subbagian Tata usaha (Persekot, SPPD, Pencairan Anggaran II) *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Ketepatan waktu pegawai Subbagian Tata Usaha terhadap penyelesaian permintaan layanan pegawai Direktorat *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Tingkat kompetensi yang dimiliki pegawai Subbagian Tata Usaha dalam memberikan pelayanan *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Responsivitas dan Kecepatan Pegawai Subbagian Tata Usaha dalam menindaklanjuti pengaduan layanan *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Keramahan pegawai Subbagian Tata Usaha dalam memberikan pelayanan *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Kesesuaian antara realisasi layanan tata usaha dengan permintaan *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Ketepatan dalam penyelesaian masalah layanan tata usaha *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Inisiatif pegawai Subbagian Tata Usaha dalam memberikan pelayanan ketatausahaan *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Keramahan pegawai Subbagian Tata Usaha dalam memberikan pelayanan *

- Sangat Puas
- Puas
- Tidak Puas
- Sangat Tidak Puas

Submit

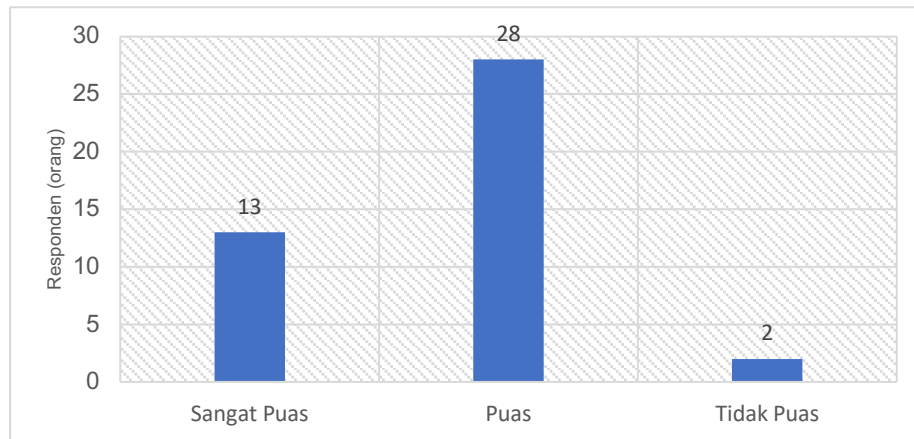
Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

b. Hasil Survey Tingkat Pelayanan terhadap Pegawai lingkup Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024

Kategori	Jumlah (orang)
Sangat Puas	13
Puas	28
Tidak Puas	2
Jumlah	43

Sumber: Direktorat Perlindungan Hortikultura (Januari 2025)



Grafik Survey Tingkat Pelayanan terhadap Pegawai lingkup Direktorat Perlindungan Hortikultura Tahun 2024